

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1 Teoritik**

Indonesia merupakan sebuah negara besar, adapun beberapa ahli yang memiliki terkait dengan negara. Seperti salah satu pandangan dari ahli yakni Prof. Miriam Budiharjo yang mengatakan bahwasanya negara diartikan sebagai organisasi yang terbentuk dalam sebuah wilayah dengan memaksakan kekuasaan yang sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya serta dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu sendiri (Prof. Miriam, 2008).

Selain itu ada pandangan ahli yakni, berasal dari Harold J. Laski yang dikutip dari buku (Shekhar, 1999) yang mengatakan bahwa “*The state is a unified society because it has a coercive authority that is legally greater than any individual or group in society.*” Yang artinya yakni Suatu negara terbentuk dari kesatuan masyarakat yang didasari oleh otoritas yang melekat, yang diakui secara resmi sebagai yang lebih tinggi daripada individu atau kelompok dalam masyarakat.

Negara juga dapat diartikan sebagai sebuah ruang keluarga, hal ini seperti yang disampaikan dalam buku Model & Desain Negara Kesejahteraan “Negara adalah sebuah keluarga besar tempat warga negara-siapapun mereka-harus diperlakukan sebagai anak-anak bangsa secara adil. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup-mati sendiri, melainkan harus dilindungi, dijaga martabatnya, dan diberi jaminan hidup sejahtera oleh negara. (Budi Setiyono, 2018)

Sedangkan pendapat lain dikemukakan Dalam jurnal *Origin of the Family, Private Property, and the State*. Di dalamnya menjelaskan bahwa negara

merupakan sebuah organisasi sosial yang berdasarkan wilayah territorial degna wewenang mengoperasikan kekuatan militer, menarik pajak, dan menjalankan administrasi. (Engels & Untermann, 2010)

Namun menurut Holliday (2000), Memaknai kesejahteraan sosial sebagai "suatu keadaan atau kondisi kesejahteraan manusia. " Kesejahteraan tercapai saat kebutuhan esensial seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan penghasilan terpenuhi dengan baik; juga ketika individu dilindungi dari risiko-risiko krusial yang mengancam kehidupannya.

Dalam kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya merujuk pada penggunaan kata kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi dimana warga negara terpenuhinya kebutuhan material dan non material.

Lalu pandangan menurut Suharto (2006), kesejahteraan sosial merupakan bagian dari sebuah usaha yang dilakukan oleh individu, organisasi sosial maupun lembaga sosial, kalangan masyarakat, maupun birokrasi pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas dari kehidupan dengan upaya pelayanan sosial serta peningkatan jaminan sosial. Kesejahteraan sosial sebagaimana hadir sebagai gambaran dari keadaan masyarakat yang terpenuhi hak kehidupannya.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Harsono Friedlander dalam (2006): kesejahteraan sosial ialah bentuk dari Hubungan yang saling terkait secara sistematis antara mekanisme tersebut berasal dari pelayanan dan lembaga sosial. Dalam situasi ini, tujuannya adalah untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan keterkaitan individu serta sosial yang membagi kesemoatan kepada kalangan dalam

mengembangkan semua kemampuan Serta kesejahteraan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing individu maupun kelompok.

Adapun pengertian kesejahteraan sosial dari pandangan segal serta bruzuzy yang dikutip dalam Suud (Harsono, Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial, 2006) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial yakni keadaan sejahtera yang dirakan kalangan masyarakat. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa aspek yakni keadaan kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan kebahagiaan, serta taraf dari kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Durham dalam (Harsono, Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial, 2006), Kesejahteraan sosial dapat dimaknai menjadi sebuah tindakan-tindakan yang tersusun secara sistematis guna meningkatkan kesejahteraan sosial, tindakan ini dilaksanakan melalui kegiatan seperti membantu individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan diberbagai bidang ataupun aspek kehidupan. Tindakan pelayanan kesejahteraan sosial berdampak pada perhatian kalangan individu, kelompok, komunitas, serta lembaga yang memiliki kesatuan penduduk yang memiliki jangkauan besar. Adapun tindakan pemenuhan kesejahteraan sosial meliputi pelayanan perawatan, pemeliharaan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal tersebut adalah bentuk tindakan yang menggambarkan manusia merupakan makhluk sosial, serta saling membantu dalam kehidupan untuk berjalan lurus dan harmonis.

Selain itu menurut Wilensky serta Lebeaux dalam (Harsono, 2006) menjelaskan bahwasanya kesejahteraan sosial sebagai sebuah mekanisme yang tersusun secara organisir dengan kerangka pelayanan serta lembaga sosial yang ada, dibentuk guna membantu kalangan individu serta kalangan kelompok untuk

lahirnya sebuah hubungan pribadi serta sosial yang memberikan peningkatan taraf hidup serta kebahagiaan. Dalam hal ini kemampuan seorang individu atau kelompok difasilitasi melalui pelayanan yang ada, untuk mampu dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar mampu dimanfaatkan.

Disamping penjelasan dari Wilensky dan lebeaux, adapun pendapat tentang *Welfare State* yang disampaikan dalam *Welfare States and Welfare State Theory* Jørgen Goul Andersen, secara singkat menjelaskan bahwa Negara mejamin kesejahteraan dengan menyediakan semacam jaminan minimum (mengurangi kemiskinan); menanggung berbagai risiko sosial (keamanan), dan menyediakan layanan tertentu (perawatan kesehatan, perawatan anak dan lansia, dll.) (Jørgen Goul Andersen, 2012). Sehingga dapat diartikan negara memberikan sebuah pemenuhan kebutuhan warga negara, sebagai bentuk dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan warga negaranya.

Dikutip dari buku Model & Desain Negara Kesejahteraan “kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, melainkan juga berkaitan dengan adanya penghargaan, kebebasan, pengakuan, dan perlindungan dari Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib menjauhkan warganya dari kemiskinan, yakni manakala individu, keluarga dan kelompok kekurangan sumber daya untuk mendapatkan makanan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang tidak umum, atau tidak mendapatkan penerimaan sosial oleh masyarakat di mana mereka berasal.” (Budi Setiyono, 2018)

Untuk mengantisipasi terkait dengan turunnya partisipasi pemerintah dalam menjauhkan warganya dari sebuah kemiskinan, pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan baik dari segi partisipasi, kondisi hidup, maupun

pemenuhan fasilitas yang memampuni untuk keberlangsungan kesejahteraan warga negara dalam menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan teori maupun pandangan tentang Negara kesejahteraan, dapat dilihat bahwa negara kesejahteraan mencakup dua jenis pengeluaran pemerintah, yaitu (i) pemberian tunai kepada rumah tangga, seperti transfer dan asuransi pendapatan wajib, serta (ii) subsidi atau penyediaan langsung layanan publik seperti pendidikan, perawatan anak, perawatan kesehatan, dan perawatan lansia. Negara kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan jaminan dasar bagi warganya. Dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan juga mencakup regulasi harga, kebijakan perumahan, perlindungan pekerjaan, serta kebijakan lingkungan yang lebih komprehensif. Meski begitu, dalam definisi sempit ini, negara berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial dasar untuk kesejahteraan warganya, sehingga memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meraih kesempatan yang setara. (Lindbeck, 2006)

Negara kesejahteraan dalam definisi sempit, mencakup pemberian tunai kepada rumah tangga, seperti transfer dan asuransi pendapatan wajib, serta subsidi atau penyediaan langsung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perawatan lansia, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini tercermin dalam komitmen negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang harus disediakan secara adil, merata, dan berkualitas. Selain itu pendidikan merupakan upaya dasar serta kerangka dalam menciptakan suasana belajar serta

proses pembelajaran guna peserta didik aktif dalam pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan. Negara bertanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan yang setara, dengan memperhatikan pemerataan dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sehingga setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Menurut profesor H. Mahmud dan Martinus Jan Langeveld (1980) menyampaikan definisi pendidikan sebagai wujud dan tindakan yang sadar untuk membimbing dan memberi dukungan kepada anak-anak yang ingin meningkatkan pengetahuan, kesehatan jasmani, dan moralitas mereka. Proses ini bertujuan untuk membantu anak-anak berkembang menuju masa depan yang sukses dan mencapai tujuan yang mulia. (Langeveld, 1980)

Supaya anak dapat meraih kebahagiaan dalam hidupnya dan tindakannya memberi manfaat untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan juga keyakinannya. Selain itu, Pendidikan bertujuan untuk membantu anak dalam mengembangkan kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu pembelajaran adalah sebuah alur untuk peningkatan kesadaran agar lebih dewasa dalam membimbing individu yang masih dalam proses menuju kedewasaan.

Dikutip dari pandangan Ahmadi dan uhbiyati dalam buku Ilmu Pendidikan, Pendidikan pada dasarnya, merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan penuh tanggung jawab oleh orang dewasa kepada anak-anak, dengan tujuan menciptakan interaksi yang mendukung pertumbuhan dan kedewasaan anak

sesuai harapan. Sebagai seseorang yang memahami pentingnya pendidikan, saya meyakini bahwa interaksi ini bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai, dan pola pikir yang berkelanjutan. Proses ini harus berjalan terus-menerus, bukan hanya dalam konteks formal seperti sekolah, tetapi juga melalui hubungan keluarga dan lingkungan sosial yang memberikan pengaruh positif bagi anak. Melalui pendekatan ini, pendidikan menjadi sarana esensial untuk membentuk individu yang siap menghadapi berbagai tantangan hidup dengan tanggung jawab dan kematangan.(Dr. Rahmat Hidayat, MA Dr. Abdillah, S.Ag, 2019)

Proses pembelajaran turut dipengaruhi oleh proses belajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harold Spears (Suprijono, 2009), belajar adalah tentang mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, dan mengikuti arahan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya alur dari pendidikan melibatkan berbagai rutinitas yang penting.

Di kutip dari (Heidjrachman Ranupandojo, 1979) Pendidikan Merupakan Sebuah tindakan dalam peningkatan Pemahaman dasar umum individu yang termasuk dalam proses meningkatkan pengenalan teori serta ketrampilan, serta menemukan dan mengembangkan solusi untuk permasalahan yang terkait dengan mencapai tujuan, baik itu dalam bidang pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

Pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai aset utama untuk mendorong perubahan dan perbaikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih unggul. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai aspek

kehidupan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional perlu terus disesuaikan dan dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan serta dinamika yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulyasa, 2006: 4).

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbarui kebijakan pendidikan untuk memastikan akses yang lebih merata dan adil bagi seluruh warga negara. Salah satu perubahan signifikan adalah penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini dirancang untuk menghapus stigma sekolah favorit, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, dan memudahkan akses bagi siswa ke sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Dengan sistem zonasi, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki peluang yang setara dalam memperoleh pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan nilai akademik semata. Langkah ini mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, sekaligus menjadi salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan sistem zonasi diterapkan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah dalam dunia pendidikan dan menciptakan pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah perkotaan dan desa. Di Kota Semarang, zonasi menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan prioritas kepada siswa yang berada di sekitar sekolah. Keberhasilan kebijakan ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk tenaga pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan yang paling utama adalah dukungan orang tua. Urgensi kebijakan zonasi di Kota Semarang terletak pada upaya memberantas diskriminasi dalam akses pendidikan dan memastikan hak pendidikan bagi setiap warga kota terpenuhi secara adil. Oleh



karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi di Kota Semarang, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan ini mampu memenuhi hak pendidikan warga negara dan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif serta merata.

### **1.1.2 Empirik**

Menurut Undang-undang dasar 1945, negara memberikan pelayanan penuh dalam bidang pendidikan secara merata serta adil guna meningkatkan mutu pendidikan seluruh warga negara Indonesia. Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB untuk sekolah negeri di Indonesia merupakan sebuah inisiatif atau kebijakan yang diharapkan dapat memecahkan beragam tantangan di bidang pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah yang diupayakan tuntas melalui penerapan kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB antara lain adalah:

#### **I. Pemerataan Sistem dan Akses Pendidikan Negeri di Indonesia**

Tujuan ini untuk memberikan kemudahan akses dan sarana kepada sekolah di Indonesia agar lebih merata ke sekolah-sekolah kota hingga pelosok agar memiliki kualitas tinggi yang merata di berbagai wilayah.

#### **II. Mengurangi Kesenjangan Pendidikan**

Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi diantara sekolah-sekolah negeri, menghilangkan budaya sekolah favorit sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi.

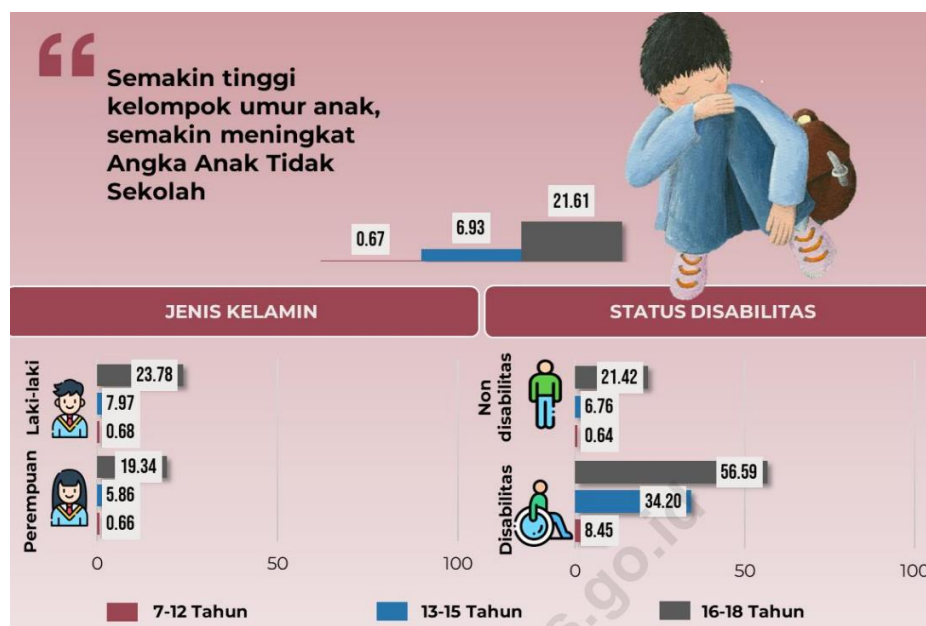
#### **III. Penyebaran Siswa Yang Lebih Merata**

Tujuan dari penyebaran ini adalah untuk menghindari sekolah yang melebihi kuota yang sudah ditentukan, dan menghindari sekolah yang memiliki peserta didik yang

sedikit. Sehingga penyebaran siswa yang lebih merata dapat dilakukan, melalui kebijakan sistem zonasi.

#### IV. Mengurangi Dampak Sosial dan Ekonomi

Penerimaan peserta didik baru terkadang menjadi permasalahan bagi Masyarakat, dimana jarak sekolah yang terlalu jauh mempengaruhi ekonomi yang membutuhkan dana lebih untuk perjalanan anak pulang pergi ke sekolah. Sehingga dengan adanya sistem zonasi ini, diharapkan jarak peserta didik tidak jauh dari sekolah. Selain itu untuk menghindari tindak kecurangan dan kesenjangan sosial, sehingga sistem zonasi menjadi terobosan tersendiri.



Gambar 1. 1 Angka Tindak Lanjut Sekolah

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa persentase anak yang tidak bersekolah masih menjadi tantangan, terutama di jenjang pendidikan menengah. Persentase anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah

relatif rendah, yakni sebesar 0,67%, dengan perincian 0,68% untuk laki-laki dan 0,66% untuk perempuan. Sementara itu, angka putus sekolah mulai meningkat secara signifikan pada kelompok usia 13-15 tahun, mencapai 6,93%, dengan perincian 7,97% untuk laki-laki dan 5,86% untuk perempuan. Tren ini semakin terlihat pada usia 16-18 tahun, di mana 21,61% anak tidak bersekolah, terdiri atas 23,78% untuk laki-laki dan 19,34% untuk perempuan.

Data ini menunjukkan bahwa ketidaksekolahan lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan di semua rentang usia. Selain itu, peningkatan tajam angka ketidaksekolahan pada kelompok usia 13-18 tahun mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap aksesibilitas pendidikan menengah dan atas. Hal ini mencakup penyebab yang mungkin berasal dari faktor ekonomi, jarak ke sekolah, hingga persepsi tentang pentingnya pendidikan lanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara komprehensif penyebab dan dampak ketidaksekolahan ini, guna mendukung kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Sistem wajib belajar di Indonesia, yang telah diterapkan sejak tahun 1984 hingga 2023, telah berjalan selama 39 tahun dan mulai menunjukkan kemajuan. Hal ini terlihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengarah pada perkembangan positif. Data APK pada tingkat SMA, misalnya, mencatat peningkatan dari 84,53 pada tahun 2020 menjadi 85,49 pada tahun 2022. Capaian ini menunjukkan minat belajar yang semakin tinggi di kalangan siswa SMA di Indonesia. Meskipun angka tersebut relatif tinggi, hasilnya masih belum sepenuhnya memuaskan. Namun, peningkatan ini mencerminkan

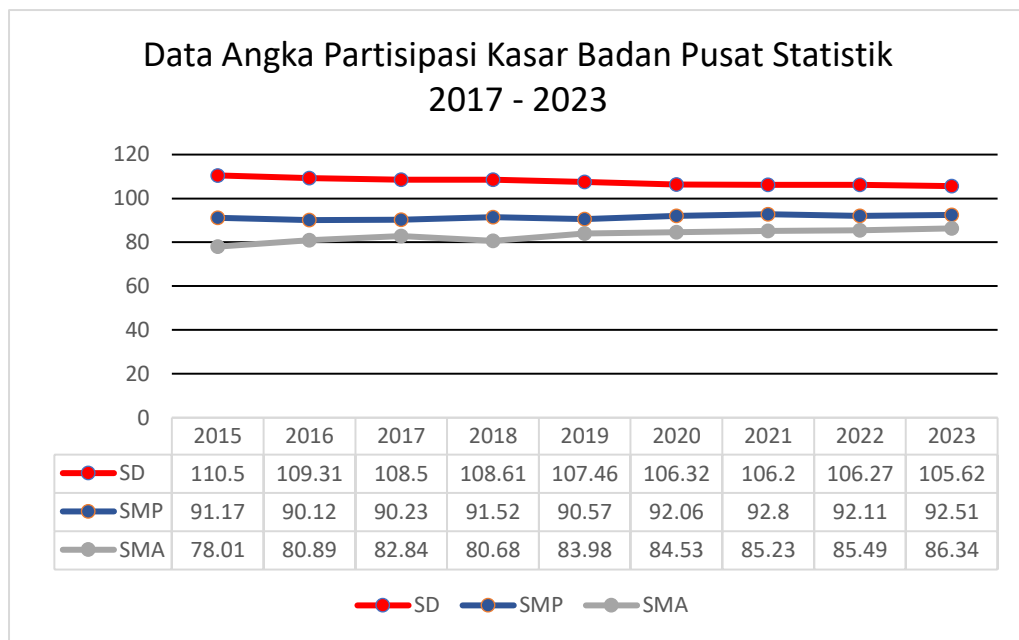
keberhasilan sistem penerimaan siswa dan persyaratan masuk SMA sebagai bagian dari program wajib belajar yang telah berlangsung selama hampir empat dekade.

Lalu Angka Partisipasi Kasar (APK) sendiri ialah indikator penting dalam mengukur akses dan partisipasi dalam sistem pendidikan. Di Indonesia, APK mencerminkan persentase populasi pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam jenjang pendidikan tertentu terhadap total populasi dalam kelompok umur tersebut. Berikut adalah gambaran tentang APK dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk data terbaru dan implikasinya:

- APK Pendidikan Dasar (SD): Persentase jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dasar terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- APK Pendidikan Menengah Pertama (SMP): Persentase jumlah siswa yang terdaftar di sekolah menengah pertama terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- APK Pendidikan Menengah Atas (SMA): Persentase jumlah siswa yang terdaftar di sekolah menengah atas terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, salah satunya dengan memantau indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). APK mencerminkan tingkat partisipasi populasi pada kelompok umur tertentu dalam jenjang pendidikan tertentu, sehingga menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi pencapaian sistem pendidikan nasional. Melalui data APK, dapat dianalisis sejauh mana kebijakan pendidikan, seperti program wajib belajar dan zonasi, mampu memenuhi hak pendidikan warga negara serta mengatasi tantangan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah. Berikut ini

adalah tren APK pada jenjang SD,SMP, dan Berdasarkan Data BPS pada tahun 2015 hingga 2023 tentang Angka Partisipasi Kasar (APK) disajikan dalam Digram di bawah :



**Grafik 1. 1 Data BPS Angka Partisipasi Kasar (APK) 2017-2023**  
(Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang Angka Partisipasi Kasar 2017-2023)

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ditampilkan pada grafik, terdapat tren yang menarik dalam partisipasi pendidikan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023. Pada tingkat pendidikan dasar (SD), APK menunjukkan angka yang tinggi dan relatif stabil meskipun sedikit menurun dari 110,5 pada tahun 2015 menjadi 105,62 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan akses yang baik pada jenjang pendidikan dasar.

Sementara itu, APK tingkat pendidikan menengah pertama (SMP) menunjukkan stabilitas pada kisaran 91-92% selama periode tersebut, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk mempertahankan partisipasi pendidikan di tingkat menengah pertama. Di sisi lain, APK tingkat pendidikan menengah atas

(SMA) mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dari 78,01 pada tahun 2015 menjadi 86,34 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan pada jenjang SMA. Namun, meskipun terjadi kemajuan, APK SMA masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya, yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan akses pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan menengah atas.

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) di Indonesia, sebagaimana terlihat dari data tahun 2015 hingga 2023, dapat dikaitkan dengan keberadaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan mendekatkan siswa ke sekolah-sekolah di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan sistem zonasi, hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam partisipasi pendidikan dapat diminimalkan, sehingga mendorong lebih banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah, yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendukung peningkatan APK secara bertahap, khususnya di tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zonasi bukan hanya sebuah upaya administratif, tetapi juga strategi untuk memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara terpenuhi.

Namun Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah dua indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi pendidikan, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. APK mengukur persentase jumlah siswa yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa

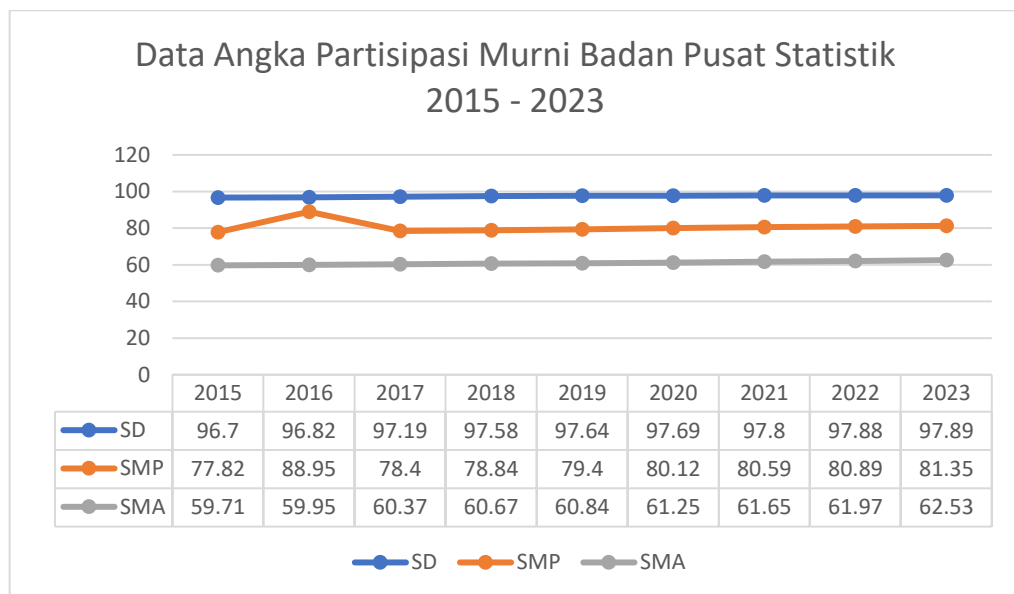
memperhatikan apakah usia siswa tersebut sesuai dengan kelompok usia ideal. Dengan kata lain, APK mencakup seluruh siswa terdaftar, termasuk yang lebih muda atau lebih tua dari usia yang seharusnya untuk jenjang tersebut. Sebaliknya, APM mengukur persentase siswa yang berusia sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya untuk jenjang pendidikan tersebut, seperti usia 7–12 tahun untuk SD, 13–15 tahun untuk SMP, dan 16–18 tahun untuk SMA. Oleh karena itu, APM memberikan gambaran lebih akurat mengenai akses pendidikan tepat waktu bagi anak-anak pada usia yang ideal. Jika APK tinggi tetapi APM rendah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak siswa yang berpartisipasi, banyak di antaranya yang tidak berada pada usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan tersebut, yang dapat mencerminkan masalah dalam kecepatan atau waktu masuk sekolah. Sebaliknya, APM yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan berhasil menyediakan akses kepada anak-anak pada usia yang tepat untuk setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator krusial dalam bidang pendidikan yang menggambarkan persentase anak-anak pada usia tertentu yang terdaftar di tingkat pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Indikator ini berbeda dari Angka Partisipasi Kasar (APK), yang tidak mengikat pada usia tertentu serta mencakup anak-anak yang mungkin berada di luar kelompok usia yang biasanya diharapkan untuk jenjang pendidikan tertentu. Dalam APM, hanya anak-anak yang berusia sesuai dengan standar jenjang pendidikan yang dipertimbangkan yang terlibat, sehingga memberikan informasi yang lebih spesifik dan tepat tentang keterlibatan pendidikan anak sesuai dengan usia yang ideal. Ini

membuat APM menjadi tolok ukur yang lebih terfokus dalam mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai usia anak-anak.

- APM Pendidikan Dasar (SD/MI): Persentase anak usia 7-12 tahun yang terdaftar di sekolah dasar.
- APM Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs): Persentase anak usia 13-15 tahun yang terdaftar di sekolah menengah pertama.
- APM Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA): Persentase anak usia 16-18 tahun yang terdaftar di sekolah menengah atas.

Berikut Data Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Data BPS pada tahun 2017 Hingga 2022 yang disajikan pada Diagram di Bawah:



**Grafik 1. 2 Data Angkat Partisipasi Murni (APM) 2017-2022**  
(Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang  
Angka Partisipasi Murni 2017-2023)

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2015 hingga 2023, terlihat adanya tren positif pada masing-masing jenjang pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar (SD), APM tetap tinggi dan stabil di atas 96%, dengan



sedikit peningkatan dari 96,7% pada 2015 menjadi 97,89% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 7-12 tahun telah terdaftar di sekolah dasar, menandakan keberhasilan dalam menjangkau anak-anak usia sekolah dasar. Pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), APM juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2015, APM SMP tercatat sebesar 77,82%, lalu meningkat menjadi 81,35% pada 2023.

Peningkatan ini mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi siswa dalam jenjang pendidikan ini, meskipun ada fluktuasi kecil pada beberapa tahun, seperti pada 2017 dan 2018. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan menengah atas (SMA), APM mengalami pertumbuhan yang lebih lambat namun konsisten. Pada 2015, APM SMA tercatat 59,71%, dan mencapai 62,53% pada 2023. Meskipun ada peningkatan bertahap, angka partisipasi SMA tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat SD dan SMP, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan ekonomi dan geografis yang dapat memengaruhi kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan lebih banyak siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran yang berbeda tentang sejauh mana sistem pendidikan di Indonesia mencakup populasi usia sekolah. Berdasarkan data APK, untuk tingkat SD, angka ini cukup tinggi, yakni 110,5% pada 2015 dan menurun menjadi 105,62% pada 2023, menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar terdaftar di sekolah, meskipun ada kemungkinan sebagian besar dari mereka lebih

tua atau lebih muda dari kelompok usia yang diharapkan. Di tingkat SMP, APK pada 2015 adalah 91,17% dan cenderung stabil di sekitar 92% pada 2023. Sementara itu, tingkat SMA menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 78,01% pada 2015 menjadi 86,34% pada 2023, mencerminkan peningkatan jumlah siswa yang terdaftar di tingkat menengah atas. Namun, data APM memberikan pandangan lebih terfokus, dengan APM SD stabil di sekitar 97,89% pada 2023, APM SMP meningkat dari 77,82% pada 2015 menjadi 81,35% pada 2023, dan APM SMA yang lebih lambat dalam peningkatannya, mencapai 62,53% pada 2023.

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak 2017 bertujuan untuk meratakan akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini tampaknya berdampak positif pada peningkatan angka partisipasi, terutama di tingkat SMP, yang menunjukkan peningkatan APM dari 77,82% pada 2015 menjadi 81,35% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan zonasi dapat membantu siswa di daerah terpencil atau kurang berkembang untuk lebih mudah mengakses pendidikan menengah pertama. Kebijakan zonasi berhasil menciptakan kesempatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, meskipun kebijakan zonasi berhasil meningkatkan APM di tingkat SMP, tantangan dalam meningkatkan APM di jenjang SMA masih ada. Pada tingkat SMA, APM hanya meningkat sedikit dari 59,71% pada 2015 menjadi 62,53% pada 2023, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang lebih besar dalam kelanjutan pendidikan setelah SMP. Beberapa faktor, seperti keterbatasan ekonomi dan kurangnya infrastruktur yang mendukung di daerah-daerah tertentu, masih

menjadi hambatan besar untuk meningkatkan angka partisipasi di tingkat SMA. Oleh karena itu, meskipun kebijakan zonasi telah efektif dalam pemerataan kesempatan pendidikan, perlu ada langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama, tetapi juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Walaupun mengalami berbanding jauh dengan data Angka Partisipasi Kasar (APK) namun terdapat peningkatan juga di dalam Angka partisipasi Murni, sehingga peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dinilai mulai mengalami perkembangan lebih baik. Keberhasilan dalam peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Jenjang SMA di Indonesia, dipengaruhi oleh Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menciptakan tindakan peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidikan di Indonesia.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah bentuk serta usaha dari komponen utama dalam manajemen pendidikan di Indonesia, dengan adanya kebijakan ini proses kegiatan sekolah dan dinas melakukan perencanaan peserta didik agar mampu diserap oleh setiap sekolah di Indonesia. Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru saat ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan mutu dan kesejahteraan pendidikan, melalui sistem Online yang transparan dan akuntabel menciptakan lingkungan administrasi yang bersih dan adil. Selain itu melalui Beberapa jalur masuk diharapkan mampu meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan.

Penerimaan siswa baru disarankan dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Proses seleksi calon siswa melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan secara cermat dan komprehensif, antara lain standar penilaian, ketentuan

penerimaan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait yang cenderung mengalami perubahan tiap tahun. Aturan penerimaan siswa baru didasari pada pedoman Kementerian Pendidikan, sehingga calon siswa harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelum diterima di lembaga pendidikan.

**SMA**  
▼ Jenjang Lain

Beranda

Sebaran NUN

Arsip Tahun Lalu

Berita

Pesan Anda

SMS

**Jadwal Pelaksanaan**  
Jadwal pelaksanaan PPDB di Kab. Semarang periode 2016/2017.

Kab. Semarang ► SMA ► Jalur Reguler ► Jadwal Pelaksanaan

**Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru**

| Kegiatan                                                  | Tanggal           | Jam                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pendaftaran</b><br>📍 kabsemarang.siap-ppdb.com         | 13 - 16 Juni 2016 | 24 jam                                                                                         |
| <b>Seleksi</b><br>📍 Sistem online                         | 13 - 16 Juni 2016 | 24 jam                                                                                         |
| <b>Verifikasi Operator</b><br>📍 kabsemarang.siap-ppdb.com | 13 - 16 Juni 2016 | 08:00 - 13:00 WIB                                                                              |
| <b>Pindah Sekolah</b><br>📍 Operator Sekolah               | 13 - 16 Juni 2016 | 08:00 - 13:00 WIB<br>(Ambil berkas dan alih sekolah paling lambat tgl 16/06/2016 pukul 10:00 ) |
| <b>Pengumuman</b><br>📍 kabsemarang.siap-ppdb.com          | 18 Juni 2016      | 24 jam                                                                                         |
| <b>Daftar Ulang</b><br>📍 Sekolah yang dituju              | 20 - 22 Juni 2016 | 08:00 - 14:00 WIB                                                                              |
| <b>Hari Masuk Sekolah</b><br>📍 Sekolah yang dituju        | 18 Juli 2016      | 08:00 - 14:00 WIB                                                                              |

**JUNI 2016**

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Sn | Sl | Rb | Km | Ju | Sb | Mg |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

**JULI 2016**

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Sn | Sl | Rb | Km | Ju | Sb | Mg |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  |    |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

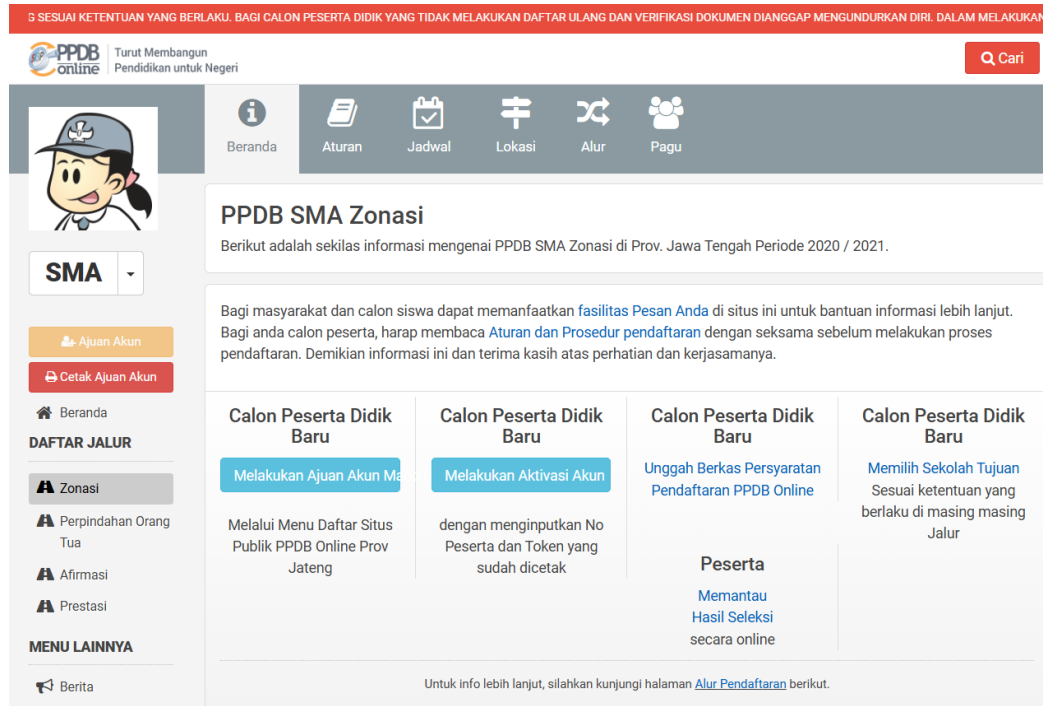
**LIHAT PESERTA PPDB KAB/KOTA LAINNYA..**

**Pantau Info & Hasil Seleksi PPDB Online dari smartphone Anda.**

Gambar 1. 2 Jadwal Pelaksanaan PPDB di Kab. Semarang 2016/2017  
(sumber: arsip.siap-ppdb.com/2016/jateng/)

Pada tahun 2016, cabang dinas wilayah 1 kota semarang sudah menerapkan pendaftara online. Namun, sebagian besar sistematis dalam penerimaan siswa baru masih tradisional atau manual. Hal ini disebabkan oleh para calon siswa baru diharuskan untuk ke sekolah tujuan untuk melakukan pendaftaran, pada tahun 2016 kota semarang sendiri sudah menerapkan pendaftaran online namun tetap manual karena diharuskan para pendaftar untuk mendaftarkan di sekolah tujuan. Pada tahun 2019, Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah sistem pusat

informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk periode pendaftaran jalur sistem zonasi lalu dikembangkan pada tahun 2020 hingga saat ini.



Gambar 1. 3 Situs PPDB SMA Zonasi  
(sumber: arsip.siap-ppdb.com/2020/jateng/)

Hal ini dilakukan full secara daring, melalui halaman situs <https://arsip.siap-ppdb.com/2020/jateng/> para pendaftar dapat melakukan registrasi hingga daftar ulang secara online. Hal ini juga didukung oleh pengembangan sistem layanan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan tuntutan dimana peserta didik baru tidak diperbolehkan datang secara langsung ke sekolah karena adanya pandemi wabah COVID-19. Akan tetapi PERMENDIKBUD tahun 2021 hingga saat ini masih belum ada perubahan maupun pergantian sistem, walaupun pandemi sudah selesai akan tetapi kebijakan dan sistem yang dilaksanakan secara online masih diterapkan.

Selain Perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik baru yang berawal dari Offline atau Luring menjadi Online atau daring, terdapat perubahan yang signifikan dalam Proses Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) ini. Yaitu dalam kebijakan sistem jalur masuk, yang di atur dalam PERMENDIKBUD No 17 Tahun 2017. Terdapat jalur masuk Sistem Zonasi, Afirmasi, dan Prestasi, kebijakan ini yang mendukung peningkatan minat belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya menetapkan standar pendidikan serta menjamin pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah menyamakan kualitas semua sekolah dan memperkenalkan konsep zonasi dalam penerimaan siswa baru. Dalam kebijakan ini, sistem zonasi diterapkan sebagai metode seleksi siswa baru. Zonasi sendiri merujuk pada pembagian wilayah menjadi beberapa zona. Istilah "zona" berasal dari kata *zone*, yang berarti area atau wilayah dengan fungsi dan karakteristik lingkungan tertentu.

Sejak diterbitkannya PERMENDIKBUD pada tahun 2017, 2019, hingga 2021, pemerintah terus berupaya menyusun standar dalam proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini terlihat dari sejumlah perubahan yang dilakukan pada kebijakan sistem zonasi dari waktu ke waktu. Pembaruan tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan.



Gambar 1. 4 Arah Kebijakan Zonasi

Zonasi merujuk pada pembagian wilayah berdasarkan tugas dan tujuan administratif yang dijabarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diharapkan bahwa melalui sistem ini, semua tingkat pendidikan terutama sekolah negeri dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat dengan merata di suatu area atau wilayah tertentu. Misi sistem ini ialah mengubah pandangan bahwa anak-anak yang dianggap paling baik perlu berusaha mencari sekolah terbaik yang jaraknya jauh dari kediaman mereka. Dikatakan bahwa PPDB (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru) dapat memengaruhi kesiapan sekolah dalam mengikuti proses pelaksanaannya dan memiliki kualitas yang setara dengan sekolah lanjutan atau sekolah pilihan.

Dilansir dari Halaman Website KEMENDIKBUD “Sistem zonasi merupakan seperangkat kebijakan yang komprehensif, terpadu, dan sistematis dalam upaya kita memulihkan sektor pendidikan, khususnya sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan kebijakan independen dari beberapa kebijakan masa lalu atau masa depan.

Dalam konteks ini, tujuan utama dari Sistem Zonasi adalah untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik dapat menerima pendidikan sesuai dengan zona tempat tinggal mereka melalui pemerataan pendidikan. Dalam hal pendidikan, tugas negara menjadi sangat penting sebagai wujud dari hak atas pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31(1), warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yaitu berhak mengenyam pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah karena sejalan dengan tujuan negara Indonesia yaitu mendidik. kehidupan bangsa, salah satunya adalah pendidikan.

Penetapan zona dalam pendaftaran PPDB 2019 dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 yang mengubah Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengenai PPDB di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sesuai dengan ketentuan PERMENDIKBUD, seleksi PPDB 2019 harus dilakukan melalui tiga jalur yang telah ditetapkan, yakni jalur zonasi dengan kuota minimal 80% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi dengan kuota antara 5-15% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota minimal 5% dari daya tampung sekolah. Oleh karena itu, pertimbangan



utama dalam PPDB 2019 adalah jarak antara rumah dan sekolah. Penyebab munculnya sejumlah permasalahan dalam PPDB 2019 adalah aturan zonasi yang diterapkan. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dengan ringkas tantangan serta langkah-langkah perbaikan dalam sistem zonasi PPDB 2019.

Sistem Zonasi untuk penerimaan peserta didik baru telah menunjukkan kestabilan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam pelaksanaan PPDB 2021 sesuai dengan PERMENDIKBUD No. Pada tahun 2021 akan dilakukan penerimaan siswa baru. Dalam PERMENDIKBUD tersebut, PPDB 2021 harus dilakukan melalui tiga jalur yang telah ditetapkan. Pilihan jalur masuk tersedia melalui Zonasi dengan syarat minimal 50%, jalur Prestasi, serta jalur Perpindahan Orang Tua/Wali murid. Dengan demikian, hal yang menjadi pertimbangan utama adalah jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah.

Dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah yakni Dinas Pendidikan Provinsi, membuat peraturan daerah yang merupakan terusan dari PERMENDIKBUD untuk dijadikan Peraturan Daerah untuk dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Provinsi.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diatur sesuai dengan undang-undang yang mengatur hal-hal seperti tujuan dan sasaran pendidikan, peserta didik, manajemen pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum, fasilitas, dan peran pemerintah daerah dalam dinas pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang penting. Implementasi pendidikan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Pemerintah Provinsi No. Pada tahun 2014, daerah kota madya atau kota yang

berada di bawah pemerintahan daerah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan masalah sosial.

Tentu saja, hal tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wilayah mereka, termasuk masyarakatnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik merupakan individu di dalam masyarakat yang mempunyai keinginan untuk memperluas kemampuan dirinya melalui proses pembelajaran pada tingkat serta pengajaran tertentu.

Dilansir dari Halaman Website Kemendikbud.go.id Kebijakan Zonasi dihadirkan guna meratakan mutu pendidikan, hal ini merupakan pendekatan yang baru dengan mewujudkan pemerataan secara menyeluruh untuk pendidikan yang ada diseluruh Indonesia. Ada beberapa perubahan yang Ditentukan dalam PERMENDIKBUD mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru, dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara PPDB 2021 dengan PERMENDIKBUD 2019. Beberapa perubahan yang akan dilakukan antara lain adalah penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pengurangan batas minimal lama domisili yang berdasarkan alamat Kartu Keluarga menjadi 1 tahun, kewajiban bagi sekolah untuk mempublikasikan daya tampungnya, dan memberikan prioritas zonasi yang sama dengan sekolah asal. Di dalam pelaksanaan di Tingkat sekolah, sehingga prioritas diberikan pada satu zona dengan sekolah asal. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB. Terlebih dahulu, pelaksanaan teknis PPDB memberikan dampak kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Masih terdapat beberapa isu yang terjadi dalam penerapan sistem

zonasi PPDB. Pada awalnya, teknis pelaksanaan PPDB menyebabkan kekacauan di antara masyarakat.

Selain adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) yang bertujuan untuk meratakan pendidikan, meningkatkan kinerja sekolah, menciptakan peluang belajar, dan mengembangkan potensi siswa. Kita perlu melihat dari bagaimana sistem zonasi ini dapat dilaksanakan, untuk pemenuhan hak pendidikan warga negara. Sedangkan beberapa Kurun waktu terakhir, banyak calon wali murid atau calon pendaftar SMA yang mendapat beberapa kendala. Sehingga hal ini menjadi polemik tersendiri, dengan demikian perlu nya pengkajian terhadap sistem Zonasi dalam memenuhi kebutuhan hak pendidikan warga negara.

Perbedaan antara sistem Zonasi dan kualifikasi terletak pada konsep yang diusung oleh masing-masing sistem. Dalam sistem kualifikasi, fokus diberikan pada gugus wilayah terdekat dengan sekolah tertentu. Apabila seorang siswa berada di luar kota atau di sekitarnya, walaupun tergolong dekat, mereka masih dianggap berada di luar kota. Bila alamat rumah sekolah atau alamat Kartu Keluarga (KK) siswa berada dalam radius yang ditentukan, siswa masih dapat mendaftar di sekolah tersebut, meskipun sistem kelayakan siswa luar kabupaten akan dibandingkan.

Salah satu tantangan di Indonesia terletak pada keterbatasan geografis, pembatasan lalu lintas, dan perumahan yang diakibatkan oleh anggapan umum bahwa sekolah unggulan lebih cenderung berlokasi di kota besar. Inilah yang terjadi di kota spesialis kuliner Lumpia dan Winko Tripes, yaitu Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini strategis berada di persimpangan pusat pemerintahan dan ekonomi. Tak hanya itu, Semarang juga dikenal sebagai salah

satu kota terpenting di Indonesia yang dipenuhi oleh beragam sejarah dan kearifan budaya yang masih terpelihara dengan baik di kalangan penduduknya. Kota Semarang memiliki 18 Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang beragam, sehingga terdapat persaingan yang ketat di antara calon peserta didik baru dalam memperoleh tempat di sekolah yang diinginkan. Di Kota Semarang, terdapat 16 sekolah menengah atas negeri yang tersebar luas, namun terdapat 2 kecamatan di sekitarnya yang belum memiliki sekolah negeri.

Berdasarkan literatur pada jurnal “Kontruksi Budaya Berprestasi: Studi Kasus Implementasi Sistem Zonasi SMA Negeri 1 Semarang”. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi terkait dengan sejauh mana SMA Negeri di Kota Semarang dapat memenuhi kapasitas daya tampung siswa. SMA Negeri 1 Semarang, misalnya, mampu menampung sebanyak 432 peserta didik, yang terdiri dari 324 siswa jurusan MIPA yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar, dengan masing-masing rombongan berisi 36 siswa, dan 108 siswa jurusan IPS yang dibagi ke dalam 3 rombongan belajar, dengan 36 siswa di tiap rombongan. Berdasarkan data dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, pada tahun 2021, terdapat 306 siswa jurusan MIPA dan 102 siswa jurusan IPS yang terdaftar sebagai peserta didik kelas 10, dengan total siswa kelas 10 angkatan 2021 yang diterima sebanyak 408 orang. Meskipun demikian, SMA Negeri 1 Semarang masih memiliki 24 bangku yang kosong pada tahun tersebut.(Aini & Wicaksono, 2020)

Selain itu, besar kecilnya tujuan politik tidak sesuai dengan harapan politik sistem zonasi PPDB, melainkan dengan tujuan sebenarnya. Masih ada orang yang bergabung dan masih bisa menipu persyaratan. Dalam satu (satu) kasus, warga

kawasan Pudak Payung Kota Semarang tahun 2019 ingin mengurus pemindahan anak dengan kartu keluarga. Seorang penduduk telah memindahkan anaknya dari kartu keluarga ke kartu keluarga penduduknya. saudara SMA Negeri 1 Semarang dekat yang sudah dikenal sebagai sekolah favorit di kota Semarang. Setelah anak ini memulai PPDB melalui jalur zonasi pada tahun 2021 dan sampai di SMAN 1 Semarang, dan setelah sampai di KK, ia kembali lagi ke kawasan Pudak Payung. Realisasi hak warga negara atas pendidikan melalui kebijakan zonasi dalam kesejahteraan sektor pendidikan sangat mendesak untuk dilihat.

Urgensi penelitian terkait kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan akses yang merata kepada seluruh masyarakat. Sistem zonasi, yang diterapkan sejak tahun 2017, bertujuan untuk meratakan kesempatan pendidikan dengan memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal di dekat sekolah. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, ada banyak tantangan yang muncul, terutama terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi semua warga negara, khususnya di kota besar seperti Semarang. Penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan zonasi benar-benar dapat memenuhi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi, dan tanpa adanya manipulasi atau ketidakadilan dalam proses seleksi.

Studi kasus pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang sangat relevan, mengingat kedua sekolah ini termasuk dalam sekolah-sekolah yang memiliki daya tampung terbatas dan menjadi tujuan favorit bagi banyak calon peserta didik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana

kebijakan zonasi diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan, baik dari sisi siswa maupun orang tua. Dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti kuota sekolah, keterbatasan geografis, dan potensi manipulasi data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan zonasi dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan di Kota Semarang, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Dalam pelaksanaan kebijakan zonasi di Kota Semarang, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dianalisis lebih dalam. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah, sejauh mana kebijakan zonasi dapat menjamin pemerataan akses pendidikan bagi semua anak di Kota Semarang? Apakah kebijakan ini sudah sepenuhnya mengatasi ketidaksetaraan yang ada, terutama terkait dengan distribusi kuota sekolah dan lokasi geografis yang mempengaruhi peluang diterima di sekolah unggulan? Selain itu, bagaimana dengan potensi manipulasi data, seperti pemalsuan alamat atau pemindahan Kartu Keluarga (KK), yang dapat mengganggu keadilan dalam penerimaan siswa? Bentuk-bentuk permasalahan lain yang mungkin muncul termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan zonasi, serta ketimpangan kualitas pendidikan antar kecamatan yang mempengaruhi kesempatan belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan zonasi terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara, serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, sehingga dapat dirumuskan bahwa inti dari permasalahan yang akan menjadi penelitian dalam permasalahan ini antara lain;

1. Bagaimana pelaksanaan akses dan pelayanan sistem zonasi di Kota Semarang?
2. Apa saja kelemahan dan bentuk kecurangan yang muncul dalam penerapan sistem zonasi di Kota Semarang?
3. Apa keuntungan dan kerugian yang ada dalam penerapan sistem zonasi di Kota Semarang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Subjektif**

Tujuan Subjektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang digunakan dalam proses penyusunan Penelitian Karya Ilmiah, dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam mendapatkan Gelar Kesarjanaan (Sarjana Ilmu Pemerintahan/S.IP) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

### **1.3.2 Tujuan Objektif**

Tujuan Objektif dari Penelitian Ini merupakan dasar pada Latar belakang permasalahan yang tercantum serta rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini hadir guna meneliti serta melihat tingkat keberhasilan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Memenuhi Hak pendidikan Warga Negara. Untuk menjadi bahan Pertimbangan bagi seluruh elemen, dalam melaksanakan dan membuat kebijakan pendidikan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil Penelitian ini dapat memberikan mafaat dan sumber informasi serta pengetahuan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan Sistem Zonasi yang menjadi kebijakan oleh Kemendikbud, apakah mampu memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara secara keseluruhan.
2. Memberikan Pengetahuan dan Wawasan yang luas mengenai bagaimana proses pemenuhan hak pendidikan dimasukkan dalam sebuah kebijakan.
3. Hasil Penelitian Ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelien lainnya yang relevan dan sejenis.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Penulis Sehingga mengetahui kemampuan penulis dalam menrepkan ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik yang diperoleh.
2. Dari Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan ataupun pedoman bagi aktor publik yang akan membuat kebijakan dibidang pendidikan, agar melihat sejauh mana kebijakan pendidikan tersebut memenuhi hak warga negara.
3. Dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui, bagaimana bentuk kebijakan dalam memenuhi Hak pendidikan yang dibutuhkan mereka.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka dalam hal ini adalah sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain, dengan sub tema ataupun materi yang relevan dengan penelitian ini. Dari hal tersebut dapat menjadi bahan informasi tambahan serta sebagai proyek



pembandingan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat menjadi bahan tolak ukur serta sebagai sumber referensi yang relevan dalam proyek penelitian saat ini. Hal tersebut akan menjadi sebuah bahan pokok dalam proses perumuan kajian teori yang secara garis besar mampu menjadi sebuah garis besar yang sejalan dengan penelitian sebelumnya, dengan hal itu juga dapat membantu peneliti untuk menentukan topik serta tema yang lebih *urgent* dari penelitian sebelumnya. Adapun materi dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

**1. Judul** : Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur.

**Peneliti** : Ahmad Mashudi

**Tujuan Penelitian** : Untuk menjelaskan dampak kebijakan sistem zonasi guna mengurangi kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antarwilayah di daerah Jawa Timur.

**Metode** : Metode Eskriptif Evaluatif

**Hasil Analisis** : Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada sistem penerimaan jalur zonasi, hal ini salah satunya melingkup tentang infrastruktur, jumlah persebaran siswa, dan jumlah guru untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan Jawa Timur. Dengan demikian sistem zonasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, dengan memperbaiki beberapa permasalahan yang pernah terjadi pada sistem zonasi yang pernah dilaksanakan.

**Kelemahan Penelitian :** Penelitian ini lebih banyak memberikan deskripsi terkait dengan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hal ini dilihat dari penjelasan persub-bab, dan hasil penelitian tidak dijelaskan secara jelas. Peneliti menjelaskan hasil dari penelitian pada bagian ‘PPDB Zonasi dan Pemerataan Pendidikan’ dengan menjelaskan latar belakang, permasalahan, serta opini dan uaya yang dilakukan oleh pemerintah atas permasalahan yang terjadi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Setelah itu peneliti lebih menjelaskan tentang Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Timur, serta menjelaskan terkait dengan tingkat pendidikan dan persaingan sumber daya alam di jaa timur dengan daerah lainnya.

**Perbedaan Penelitian :** Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mashudi dengan judul ‘Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan kualitas sumberdaya manusia di jawa timur’ memiliki titik fokus untuk melihat bagaimana sistem zonasi di Jawa timur berlangsung dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, hal ini meliputi pemerataan guru, jumlah persebaran, serta kuota dari peserta didik yang akan diterima. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memiliki titik fokus untuk melihat dan menguji apakah kebijakan sistem zonasi masih efektif untuk digunakan pada penerimaan peserta didik baru dan melihat apakah sistem zonasi dapat memenuhi sistem pendidikan warga negara. Karena pada kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan memiliki tujuan pemerataan, dari pemerataan ini perlu dilihat apakah bisa memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara atau tidak.

**2. Judul** : Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan

**Peneliti** : Gunarti Ika Pradewi

**Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui tentang kebijakan sistem Zonasi dalam perspektif pendidikan di Indonesia.

**Metode** : Kualitatif – Fenomenologi

**Hasil Analisis** : Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Zonasi menjadikan akses layanan pendidikan menjadi mudah, selain itu dampak positif lainnya adalah Zonasi juga dapat meratakan kualitas pendidikan di sekolah, dibalik itu semua zonasi menjadi permasalahan karena dianggap menurunkan kualitas sekolah, membatasi siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan, dan terakhir adalah sistem zonasi berorientasi pada siswa siswi yang berasal dari daerah terdekat. Sehingga hal tersebut menghilangkan jiwa Bhineka Tunggal Ika.

**Kelemahan Penelitian** : Terkait dengan data yang digunakan masih belum cukup kuat dalam menyajikan argumen yang ada dalam hasil penelitian, selain itu juga tidak ada data valid terkait dengan jumlah infrastruktur atau sarana prasarana yang disebutkan pada poin hasil yang menunjukkan bahwa sistem zonasi harus mendukung sarana Prasarana.

**Perbedaan Penelitian** : Dalam penelitian yang dilakukan ini, terdapat perbedaan dari segi data yang digunakan, sumber data, informasi yang diberikan, serta metode yang digunakan. Selain itu dalam penelitian sebelumnya ini, menjelaskan terkait dengan poin sistem zonasi berlangsung dari sisi pandangan atau opini. Sedangkan dalam proyek penelitian saat ini, peneliti menitik tumpukan pada efektivitas sistem zonasi dalam memberikan hak pendidikan bagi warga negara.

**3. Judul** : Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022

**Peneliti** : Taufiqi Ilham Adzim

**Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui proses implementasi serta permasalahan- permasalahan dalam proses implementasi sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang

**Metode** : Metode Penelitian Kualitatif

**Hasil Analisis** : Dalam penelitian ini, ditemukan perbedaan antara data yang ada di lapangan dan rencana realisasi yang terlihat dari jumlah siswa yang akan diterima di SMA Negeri 1 Semarang, di mana terdapat sekitar 24 bangku yang belum terisi pada PPDB tahun 2021. Calon peserta didik telah melakukan manipulasi data dalam proses Penerimaan Peserta didik baru, yang juga menjadi fokus peneliti. Manipulasi ini dilakukan dengan memindahkan data Kartu Keluarga sehingga lebih dekat dengan zona zonasi yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

**Kelemahan Penelitian** : Pada penelitian ini, peneliti membandingkan dua SMA negeri yakni SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 9 Semarang. Pada data maupun hasil penelitian, data lebih banyak condong bagaimana kecurangan dan alur serta data dari PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 1 Semarang. Sehingga penelitian ini seolah hanya merujuk pada 1 Sekolah saja.

**Perbedaan Penelitian** : Pada penelitian ini, peneliti lebih condong bagaimana sistem zonasi berjalan dan permasalahan yang dituju pada sistem zonasi ini hanya pada 1 Sekolah saja. Sehingga tidak ada pembanding antara SMA Negeri 1 dengan SMA Negeri 9 Semarang. Sehingga data yang disajikan data tunggal yang berasal

dari 1 Instansi sekolah, sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan riset dengan membandingkan bagaimana efektivitas sistem zonasi dapat memenuhi hak pendidikan warga negara dengan melihat dua SMA Negeri yang terpendang. Sehingga data kecurangan yang ada dapat dibandingkan secara langsung.

**4. Judul** : Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan

**Peneliti** : Dian Purwanti, Ira Irawati, Josy Adiwisastro

**Tujuan Penelitian** : Melakukan Evaluasi terkait dengan efektivitas kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada tahun 2017 dan 2018, untuk membuktikan terkait dengan sistem zonasi mampu meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa.

**Metode** : Penelitian Kuantitatif dengan tujuan mencari faktor penghambat serta faktor yang menyebabkan kebijakan sistem zonasi tidak efektif.

**Hasil Analisis** : Dalam penelitian ini, peneliti mendapat hasil bahwa sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru membuahkan sebuah kemajuan ke arah yang baik. Hal ini ditandai pada data penelitian bahwa angka partisipasi kasar dari siswa RMP meningkat. Hal ini disebabkan sistem pengelompokan zonasi berdasarkan domisili mempermudah siswa yang memiliki jarak rumah dekat sekolah, untuk langsung diterima pada sistem zonasi. Namun data peningkatan angka partisipasi kasar ini belum 100% hal ini disebabkan masih banyaknya kecurangan yang terjadi dan dilakukan oleh orang tua, hal ini banyak terbukti dan terjadi dikalangan ekonomi tinggi. Hal ini dilakukan dengan mengubah lokasi kartu keluarga, adapun yang menitipkan anaknya pada keluarga yang beradanya pada

sekolah dengan radius yang diinginkan oleh wali murid tersebut. Selain itu permasalahan seperti surat keterangan tidak mampu masih bisa dibuat oleh masyarakat yang memiliki ekonomi diatas ketentuan tidak mampu, hal ini bisa disebabkan karena adanya kekuatan atau kemampuan dari kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua wali murid tersebut sehingga mudah membuat surat keterangan tidak mampu. Namun masih ada indikator yang belum menunjukkan perubahan yang lebih baik, yakni stigma masyarakat akan sekolah favorit atau sekolah yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang lain.

**Kelemahan Penelitian :** Pada penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam proses perumusan hasil penelitian maupun penyampaian data penelitian, hal ini bisa dilihat dari tabel yang disajikan. Pada tabel yang disajikan oleh peneliti, tidak dijelaskan indikator yang jelas serta unsur-unsur yang ada dalam tabel penelitian. Selain itu juga pada data penelitian yang berbentuk tabel, tidak dijelaskan secara terinci. Akan tetapi peneliti lebih menjelaskan data lapangan berupa permasalahan yang terjadi, tidak menjelaskan hasil berdasarkan data yang sudah dimiliki. Sehingga hal ini bisa menjadi kekurangan tersendiri bagi peneliti. Selain itu peneliti tidak menjelaskan terkait dengan daerah atau wilayah yang dimaksud pada pembagian kelompok pada penerimaan peserta didik baru di setiap wilayah sekolah. Hanya menjelaskan perbatasan zona serta jumlah peserta didik yang diterima oleh sekolah tersebut.

**Perbedaan Penelitian :** Pada penelitian yang berjudul “ Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan” peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan tujuan mencari hasil data yang mempengaruhi atau memperlambat dari keberjalanan

kebijakan. Namun hasil dalam penelitian ini masih belum bisa dipaparkan dengan jelas, faktor berdasarkan data yang sudah diberikan dalam tabel penelitian.

Sedangkan pada penelitian “Kebijakan zonasi dan pemenuhan hak pendidikan warga negara” penelitian menggunakan metode kualitatif, hal ini bertujuan untuk melihat kebijakan tersebut sudah efektif atau belum. Melalui kuesioner terbuka, sehingga persertase serta opini yang disampaikan bisa dijadikan data penelitian yang lebih akurat. Dan lebih luas dalam mengetahui faktor apa saja yang membuat kebijakan sistem zonasi ini menjadi terhambat atau bermasalah di PPDB kota Semarang.

## **1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1. Teori Pendidikan**

Teori pendidikan adalah konsep atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan proses pendidikan. Para ahli pendidikan telah mengembangkan berbagai teori yang masing-masing memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan dan apa yang harus menjadi tujuannya. Berikut adalah beberapa teori pendidikan menurut para ahli:

#### **1. Teori *Behaviorisme* (B.F. Skinner, John Watson, 1958)**

*Behaviorisme* adalah teori yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pembelajaran. Menurut teori ini, lingkungan memainkan peran besar dalam membentuk perilaku melalui reinforcement (penguatan) dan punishment (hukuman).

Selain dikutip dari buku “Teori Belajar *Behaviorisme* Dalam Perspektif Pemikiran Tokoh-tokohnya” (Hamruni et al., 2019), menurut pandangan Edwin

Ray Guthri berpendapat bahwa proses pendidikan, mirip dengan pendekatan teori behaviorisme Thorndike, sebaiknya dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas, yakni menentukan respons yang diharapkan muncul dari stimuli tertentu. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung munculnya respons yang diinginkan saat stimuli dihadirkan. Dalam pandangannya, motivasi tidak dianggap sebagai faktor utama dalam pembelajaran; yang lebih penting adalah memastikan bahwa siswa memberikan respons yang sesuai terhadap stimuli yang diberikan.

“B.F. Skinner (1991)”: Menekankan pada penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku. Dia percaya bahwa pembelajaran adalah hasil dari perubahan dalam perilaku yang diperoleh melalui penguatan.

“John Broadus Watson”: Perilaku manusia merupakan hasil dari pengalaman yang diperoleh, dan perilaku tersebut dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi penderitaan. Pandangan bahwa pengalaman memiliki pengaruh dominan dalam membentuk perilaku menunjukkan betapa fleksibelnya sifat manusia. Dengan menciptakan lingkungan yang sesuai, manusia dapat dengan mudah diarahkan atau dibentuk menjadi sesuatu yang diinginkan.

## **2. Teori *Kognitivisme* (Jean Piaget (1983), Jerome Bruner (1966))**

*Kognitivisme* fokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Teori ini melihat pembelajaran sebagai proses internal yang melibatkan pemahaman dan pengorganisasian informasi.

“Jean Piaget (1983)”: Mengembangkan teori tahapan perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman



mereka tentang dunia melalui empat tahap: sensorimotor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional (Lefa, 2014).

“Jerome Bruner (1966)”: Menekankan pentingnya struktur kognitif dan bagaimana pembelajaran dapat difasilitasi melalui scaffolding, yaitu memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.(Johnson, 2014).

### **3. Teori *Konstruktivisme* (Lev Vygotsky (1934), Jean Piaget (1980))**

Dalam Teori Konstruktivisme mengacu pada kutipan Jurnal “Zone of Proximal Development and Social Constructivism Based Education According To Lev Semyonovich Vygotsky” Salah satu perhatian utama Vygotsky adalah pendidikan anak, yang dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai psikolog anak, khususnya saat bekerja dengan anak-anak yang memiliki kecacatan mental di Lembaga Kecacatan Eksperimental. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang pendidikan anak. Vygotsky berpendapat bahwa meskipun guru dan sekolah menghadapi kesulitan dalam mengatasi ketimpangan sosial, mereka memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dunia yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian anak. (Marselus Rubben Payong, 2020).

“Lev Vygotsk (1934)”: Menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Konsepnya tentang “zona perkembangan proksimal” menunjukkan bahwa siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya. (Marselus Rubben Payong, 2020).

“Jean Piaget (1980)”: Piaget, sebagai salah satu tokoh utama dalam teori konstruktivisme, menganggap bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan sekitar (Prakash Chand, 2023). Adanya sistem ini memberikan peluang bagi siswa untuk mendapatkan

pembelajaran yang lebih relevan dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan usia dan perkembangan kognitif mereka.(Dr. BADA & Steve Olusegun, 2015)

Di dalam Undang-Undang Dasar terletak sebuah pasal yang menjelaskan tentang sistem yang mengatur pendidikan Nasional, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada pasal 1. Yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara.”

Lalu proses dalam Mengembangkan pendidikan dan menyeimbangkan distribusi pendidikan memiliki makna yang serupa. Perluasan pendidikan sangat penting karena menekankan usaha pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang kemudian tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk daerah terpencil. Arti dari pendidikan yang setara lebih menekankan usaha pemerintah dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara si miskin dan si kaya, begitu juga antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. (Ramazan Avcu & Seher Avcu, 2022).

Menurut (Husnan, 2011) Pendidikan merupakan proses memperluas wawasan dan pengetahuan secara umum, termasuk dalam mengembangkan keterampilan dan teori, serta dalam kemampuan kita dalam pengambilan keputusan

dan menemukan penyelesaian bagi masalah yang muncul baik dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat Notoadmodjo (2003:77), pelatihan formal di dalam suatu organisasi dapat disebut sebagai upaya pengembangan keterampilan menuju arah yang diharapkan oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan teori-teori pendidikan yang telah dijelaskan, beberapa indikator relevan untuk penelitian kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara dapat dikembangkan dengan mengacu pada berbagai teori pendidikan.

1. Teori Behaviorisme (B.F. Skinner, John Watson):

- **Indikator:** Pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa dalam konteks zonasi, seperti pengaruh zonasi dalam meningkatkan partisipasi siswa di sekolah-sekolah negeri.
- **Relevansi:** Kebijakan zonasi dapat dilihat sebagai cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk masuk ke sekolah terdekat mereka dan mengurangi hambatan sosial-ekonomi yang menghalangi akses pendidikan.

2. Teori Kognitivisme (Jean Piaget, Jerome Bruner):

- **Indikator:** Peningkatan kemampuan kognitif siswa dalam memahami dan memproses informasi yang diberikan oleh sekolah berdasarkan kebijakan zonasi.
- **Relevansi:** Kebijakan zonasi berpotensi mempengaruhi perkembangan kognitif siswa, dengan memberikan kesempatan belajar yang lebih relevan

dan kontekstual sesuai dengan tahap perkembangan mereka (Piaget), serta memfasilitasi pemahaman lebih mendalam tentang dunia mereka melalui interaksi sosial yang lebih dekat (Bruner).

3. Teori Konstruktivisme (Lev Vygotsky, Jean Piaget):

- **Indikator:** Partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan kontribusi teman sebaya serta guru dalam mendukung zona perkembangan proksimal mereka.
- **Relevansi:** Dengan kebijakan zonasi, siswa dapat belajar dalam lingkungan yang lebih mendukung dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, sistem zonasi memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar di lingkungan yang lebih familiar dengan dukungan dari komunitas lokal dan pengaruh lingkungan sosial.

4. Pendidikan yang Setara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003):

- **Indikator:** Pemerataan akses pendidikan yang adil untuk semua kelompok masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- **Relevansi:** Kebijakan zonasi harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status ekonomi atau tempat tinggal, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan belajar.

Dengan menggabungkan teori-teori tersebut, indikator penelitian untuk kebijakan zonasi dapat mencakup pemerataan akses, kualitas pendidikan, peran lingkungan, dan perkembangan kognitif siswa yang sesuai dengan usia dan tahapan

mereka. Evaluasi terhadap kebijakan zonasi juga harus mempertimbangkan keberhasilan dalam memenuhi hak pendidikan untuk semua warga negara secara adil, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses pendidikan.

### **1.6.2. Teori Pemerataan Pendidikan (Educational Equity Theory)**

Teori pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory) merupakan konsep yang banyak dibahas oleh para ahli pendidikan dan sosiologi. Teori ini berfokus pada keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan, kesempatan, dan hasil belajar, serta usaha untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan dalam sistem pendidikan.

Pemerataan Pendidikan dalam pendidikan berarti semua sekolah dan sistem pendidikan harus memberikan peluang belajar yang setara kepada seluruh siswa, tanpa memandang status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau latar belakang keluarga maupun imigrasi. Dengan demikian, siswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik yang sebanding dalam bidang kognitif utama seperti membaca, matematika, dan sains. Selain itu, mereka juga diharapkan mencapai tingkat kesejahteraan sosial dan emosional yang setara, mencakup kepuasan hidup, kepercayaan diri, dan integrasi sosial, selama perjalanan pendidikan mereka. (Levinson et al., 2022)

Berikut adalah penjelasan teori pemerataan pendidikan menurut beberapa ahli:

#### **1. James S. Coleman**

James Samuel Coleman, seorang ahli sosiologi terkenal dari Universitas Chicago, pernah menjabat sebagai presiden asosiasi sosiologi amerika serikat pada

tahun 1991 – 1992. Coleman adalah salah satu pelopor dalam studi tentang pemerataan pendidikan melalui buku *Turning The Page on the Equity Debate in Education: How to Give All Children a Real Opportunity*, pandangan James Coleman tentang pendidikan menekankan pentingnya faktor lingkungan sosial dalam menentukan kesempatan pendidikan bagi anak-anak. Coleman juga berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Oleh karena itu, bagi Coleman, kebijakan yang hanya fokus pada perbaikan kualitas sekolah atau kurikulum saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan pendidikan. (Riley & Coleman, 2011).

Pandangan: Coleman berpendapat bahwa akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan semua siswa, tanpa memandang latar belakang mereka, untuk memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.

## 2. John Bordley Rawls

John Boardley Rawls, seorang filsuf asal amerika serikut, dengan bidang pendidikan hukum dan moral yang menulis buku “*A Theory Of Justice*” yang menjelaskan terkait dengan persamaan kebebasan dasar, dan persamaan kesempatan yang mungkin semua mendapatkan akses dan pelayanan yang sama. Dalam buku yang berjudul “*A Theory of Justice*” (1971), Rawls memperkenalkan prinsip keadilan sebagai kewajiban, yang dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan. Sehingga terdapat pemerataan dalam kebebasan dalam meraih kesempatan dan meraih pelayanan yang sama.

Dalam *A Theory of Justice*, John Rawls mengemukakan dua pandangan utama mengenai keadilan yang dapat diterapkan dalam masyarakat: prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan:

**Prinsip Kebebasan yang Setara:** Rawls mengemukakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Prinsip ini mengedepankan hak setiap individu untuk memiliki kebebasan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau karakteristik lainnya. Dalam penerapannya, setiap orang harus memiliki kebebasan yang setara dalam struktur masyarakat, yang menciptakan ruang yang adil untuk semua warga negara dalam membuat keputusan.

**Prinsip Perbedaan:** Prinsip ini mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, namun dengan syarat bahwa ketidaksetaraan tersebut harus menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Artinya, ketimpangan yang ada seharusnya memperbaiki kondisi hidup mereka yang paling rentan, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Rawls berpendapat bahwa dalam struktur sosial yang adil, ketidaksetaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi mereka yang paling membutuhkan. (Rawls, 1974).

### 3. Jeannie Oakes

Jeannie oakes merupakan seorang filsuf pendidikan, yang melakukan pengembangan kesetaraan pada bidang pendidikan. Yang diterapkan pada UCLA, sekaligus penerapan pada center X. Pemikiran tentang kesetaraan ini dituang ketika bergabung dengan RAND sebagai ilmuwan sosial dalam bidang pendidikan, lalu melakukan berbagai penelitian hingga menciptakan karya “Keeping Track: How Schools Structure Inequality” (1985).

Di dalam bukunya, Jeannie Oakes menunjukkan bagaimana sistem penempatan siswa berdasarkan kemampuan (tracking) dapat memperkuat ketidaksetaraan pendidikan. Ia menekankan perlunya reformasi untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara dan berkualitas.

#### Prinsip-Prinsip Utama Teori Pemerataan Pendidikan:

1. Akses Setara:

- Setiap individu harus memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau lokasi geografis.

2. Distribusi Sumber Daya:

- Sumber daya pendidikan, termasuk guru yang berkualitas, fasilitas, dan teknologi, harus didistribusikan secara adil untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang berbeda.

3. Keadilan dalam Proses Pendidikan:

- Proses pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, termasuk memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung.

4. Hasil Pendidikan yang Setara:

- Tujuan akhir adalah memastikan bahwa hasil pendidikan, seperti pencapaian akademis dan peluang karir, dapat diakses secara merata oleh semua siswa.

#### Aplikasi dalam Kebijakan Zonasi Pendidikan:



- Analisis Kesenjangan: Mengidentifikasi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai zona.
- Distribusi Sumber Daya: Memastikan alokasi sumber daya pendidikan yang adil di semua zona.
- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan zonasi untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan pendidikan tercapai. Dengan landasan teori pemerataan pendidikan, penelitian mengenai sistem zonasi dapat lebih terfokus pada upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

### **1.6.3. Teori Kesejahteraan**

Kesejahteraan menurut (Sunarti, 2012) Merupakan suatu kondisi kehidupan yang teratur dan tertib, baik dalam hal material maupun spiritual, yang memberikan rasa aman, kesopanan, serta kedamaian jiwa dan raga sehingga setiap individu dapat berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Potensi kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang dimiliki oleh individu, keluarga, serta masyarakat.

Menurut teori dari Grand theory, Kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai konsep negara kesejahteraan menurut Bentham (1748-1832) seperti yang disebutkan oleh Sukmana (2016). Teori tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kebahagiaan terbesar (atau kesejahteraan) bagi sebanyak mungkin warganya. Bentham menggunakan istilah 'utilitas' untuk menjelaskan sebuah konsep tentang kebahagiaan atau kesejahteraan. Menurut pandangan Bentham berdasarkan prinsip utilitarianisme,

sesuatu dianggap baik jika dapat memberikan kebahagiaan lebih. Sementara itu, apa yang membuat rasa sakit begitu terasa menyakitkan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah suatu bentuk komunitas yang terstruktur dengan baik, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, terlihat upaya yang dilakukan oleh lembaga baik dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mencegah, mengatasi, atau turut serta dalam menyelesaikan masalah sosial, serta meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Di beberapa negara maju, kesejahteraan sosial dikenal dengan istilah program-program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah, khususnya untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau tidak mampu. Namun di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan utama atau syarat yang harus terpenuhi agar masyarakat bisa hidup dengan baik, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

#### **1.6.4. Teori Pemerataan**

Teori Pemerataan merupakan teori yang menjelaskan terkait dengan rayonisasi atau persebaran sesuai dengan berbagai unsur-unsur yang sudah di klasifikasi, dalam hal ini tujuan pembagian ini agar terciptanya pemerataan yang sesuai kebutuhan. Selain hal itu, dasar dari terciptanya pemerataan adalah berdasarkan penyelenggaraan asas keadilan.

Dikutip dari jurnal *Distributed computing meets game theory*, (Abraham, 2006) Pemerataan merupakan sebuah konsep dimana seluruh elemen ataupun

rangkaian-rangkaian yang ada. Disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di setiap daerah, walaupun dalam game theory akan ada daerah atau wilayah yang memiliki dominasi tinggi maupun rendah.

Dalam pengembangan pendidikan, keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sangat penting. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, perencanaan yang matang harus dijalankan. Saat membicarakan perencanaan pembangunan, dianjurkan untuk menggunakan minimal dua pendekatan yang berbeda. yaitu:

- Pendekatan secara administrasi negara (public administration)
- Pendekatan secara manajerial (management approach)

Memperluas pendidikan serta pemerataan memiliki makna yang serupa. Peningkatan pendidikan lebih dititikberatkan pada usaha pemerintah dalam memperluas akses sarana dan prasarana pendidikan hingga merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pelosok-pelosok. Pendidikan setara penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam akses pendidikan, yang menjadi fokus utama pemerintah. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, begitu pula antara penduduk perkotaan dan pedesaan. (Risna et al., 2020)

- Robert Nozick

Padangan Robert Nozick terkait dengan teori yang dikemukakan dalam (Justice as Entitlement), yang dibagi menjadi beberapa prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

- Prinsip Perolehan: dalam prinsip perolehan seorang individu berhak atas sebuah sesuatu jika diperoleh dengan kemampuannya sendiri dan dengan cara yang adil, seperti contoh masuk sekolah favorit, masuk ke universitas ternama.
- Prinsip Transfer: dalam prinsip transfer seseorang memiliki hak atas sesuatu jika diperoleh melalui sistem transfer yang sah dan adil, atas perpindahan dari orang lain dengan haknya sendiri.
- Prinsip Koreksi: dalam prinsip koreksi yang dimana ketidakadilan dalam perolehan atau transfer di masa lalu harus diperbaiki.

Dalam hal ini Robert Nozick memberikan pandangannya bahwa peran negara harus sangat terbatas, hanya untuk melindungi hak-hak individu seperti kepemilikan properti dan kebebasan pribadi. Redistribusi sumber daya oleh negara dianggap melanggar hak-hak individu kecuali dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan yang nyata. (Salahuddin, 2018)

Teori Robert Nozick sebagai *Entitlement* :

- Prinsip Perolehan: Indikator untuk mengevaluasi apakah kebijakan zonasi memberikan kesempatan yang adil kepada siswa untuk memilih sekolah berdasarkan merit, bukan hanya berdasarkan kedekatan geografis.
- Prinsip Transfer: Melihat apakah ada sistem yang adil untuk memungkinkan transfer atau peralihan siswa antar zona jika mereka memenuhi kriteria tertentu.
- Prinsip Koreksi: Menilai apakah kebijakan zonasi memiliki mekanisme untuk memperbaiki ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang muncul selama

proses pendaftaran, terutama bagi siswa yang mungkin mengalami hambatan akibat ketidakadilan sosial atau ekonomi.

#### **1.6.5. Teori Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah hal yang prinsip dan menjadi tugas pemerintah. Teori mengenai pelayanan publik melibatkan pandangan para ahli. Jika benar bahwa setiap individu membutuhkan pelayanan, maka bisa disimpulkan dengan sangat kuat bahwa pelayanan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. (Sinambela, 2010:3).

Adapun pandangan terkait dengan pelayanan sektor publik yakni dari Agung kurniawan (2005:6), Menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan upaya memberikan layanan kepada orang lain atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian yang dikutip oleh Sinambela (2014:5), Layanan merupakan rangkaian aktivitas yang terjadi saat berinteraksi secara langsung antara individu dengan individu lain atau perangkat, yang bertujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan dijelaskan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan cara atau hasil dari pelayanan.

Menurut Mahmudi (2007: 128) Pelayanan publik merujuk kepada segala layanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberlakukan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut penelitian oleh Sinambela (2014: 5), pelayanan publik adalah upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi

masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan kepuasan tanpa harus dihubungkan dengan hasil fisik dari suatu produk.

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Menurut pendapat Fitzsimons dalam penelitiannya yang dilakukan oleh (Sinambela, 2006), terdapat lima indikator Pelayanan Publik, yaitu:

1. Keandalan tercermin dari pemberian layanan yang akurat dan tepat.
2. Pada tangibles, tersedia sumber daya manusia dan sumber daya lain yang cukup.
3. Responsiveness yang tercermin dalam keinginan untuk melayani konsumen secara cepat.
4. Pentingnya menonjolkan perhatian yang tinggi terhadap aspek etika dan moral saat memberikan layanan.
5. Empati tercermin dari seberapa besar minat untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen.

Selanjutnya menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi. Yaitu :

1. *Tangible* (Berwujud).
2. *Reliability* (Kehandalan).
3. *Responsiveness* (Ketanggapan).
4. *Assurance* (Jaminan).
5. *Empathy* (Empati).

Boediono kemudian menjelaskan bahwa terdapat beberapa hakikat pelayanan publik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat:

- Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah dalam bidang pelayanan publik.
- Mendorong pengembangan sistem dan tata kelola pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan kesuksesan layanan umum.
- Mendorong berkembangnya kreativitas, inisiatif, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **1.7. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian ini menguraikan alur logis dari identifikasi masalah, penetapan tujuan, hipotesis, metodologi, hingga analisis data, untuk menilai efektivitas sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara berdasarkan aspek Akses, Pelayanan, kelemahan, kecurangan, maupun keuntungan.

## 1. Identifikasi Masalah

Latar Belakang:

1. Kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk mendistribusikan siswa berdasarkan tempat tinggal guna meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah.
2. Meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan, terdapat berbagai tantangan dan kontroversi terkait efektivitasnya.

- Masalah Utama yang menjadi permasalahan

- Apakah kebijakan zonasi telah secara maksimal dalam memenuhi hak pendidikan bagi semua warga negara?

- Permasalahan yang akan menjadi bahan sub-penelitian

- Bagaimana aksesibilitas pendidikan di berbagai wilayah setelah penerapan kebijakan zonasi?
- Bagaimana dengan kelemahan dan kecurangan pendidikan di sekolah-sekolah yang termasuk dalam zona?
- Apakah keuntungan dari sistem zonasi sudah berjalan secara adil dan merata?
- Bagaimana kendala serta kelemahan terhadap kebijakan zonasi?

- Penetapan Tujuan Penelitian

Tujuan Utama:

1. Mengevaluasi kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara.

Tujuan Spesifik:



1. Menilai tingkat aksesibilitas pendidikan di berbagai zona.
2. Mengukur tingkat kecurangan dan kelemahan pendidikan di sekolah-sekolah yang termasuk dalam zona.
3. Mengevaluasi keadilan dalam distribusi siswa.
4. Menilai kepuasan siswa terhadap kebijakan zonasi.

- Kerangka Teoritis

Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*):

1. John Rawls: Prinsip keadilan yang mendasari kebijakan untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok yang paling tidak beruntung.
2. Amartya Sen: Pendekatan kemampuan yang menekankan pada kebebasan substantif individu untuk mencapai tujuan yang mereka nilai berharga.

Teori Pemerataan Pendidikan:

1. Pendidikan harus diakses secara merata oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi.
2. Kebijakan zonasi sebagai instrumen untuk mencapai pemerataan tersebut.

Model Input-Proses-Output:

1. Input: Sumber daya yang masuk dalam sistem pendidikan (guru, fasilitas, kurikulum).
2. Proses: Pelaksanaan pendidikan di sekolah (metode pengajaran, manajemen sekolah).
3. Output: Hasil dari proses pendidikan (prestasi siswa, kepuasan siswa dan orang tua).

- Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian: kualitatif (dengan dukungan koesioner Terbuka)

Metode Pengumpulan Data:

1. Kuesioner Terbuka: Distribusi kepada orang tua dan siswa untuk mengumpulkan data kualitatif.
2. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih detail.
3. Observasi: Mengamati langsung proses penerapan kebijakan zonasi di beberapa sekolah.

Teknik Analisis Data:

1. Analisis Deskriptif: Untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian.
2. Analisis Kualitatif: Untuk mengidentifikasi tema dan pola dari data kualitatif.

Hasil yang Diharapkan

Temuan Utama:

1. Penilaian menyeluruh tentang kebijakan zonasi dalam memenuhi hak pendidikan warga Negara di Kota Semarang.
2. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan zonasi.
3. Mengetahui apa saja bentuk kecurangan, kelemahan, keunggulan, dan kekurangan dari kebijakan sistem zonasi.

Rekomendasi:

1. Rekomendasi untuk peningkatan kebijakan zonasi berdasarkan temuan penelitian.

2. Saran untuk pemangku kebijakan tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan.

Sehingga dengan demikian dalam kerangka berfikir ini, penelitian tentang kebijakan sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara mampu dilaksanakan secara sistematis serta komprehensif. Selain itu kerangka berfikir ini membantu peneliti dalam memahami variabel serta faktor-faktor yang akan digunakan serta dicari dalam proses penelitian nanti. Dengan menginterpretasikan hasil yang baik serta data akurat, sehingga dapat menjadi bahan ajar serta memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan.

### **1.8. Operational Konsep**

Operasional konsep adalah langkah penting dalam penelitian untuk mengubah konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam konteks penelitian efektivitas sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, operasional konsep mencakup definisi dan indikator yang spesifik untuk mengukur bagaimana kebijakan zonasi berkontribusi terhadap pemenuhan hak pendidikan. Berikut adalah cara mengoperasionalkan konsep tersebut:

#### **1. Efektivitas Sistem Zonasi**

Efektivitas sistem zonasi diartikan sebagai sejauh mana kebijakan zonasi berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi semua warga negara. Indikator tersebut antara lain:

- 1) Akses ke Sekolah: Persentase siswa yang diterima di sekolah dalam zona mereka.

- 2) Distribusi Siswa: Sebaran siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi di berbagai sekolah.
- 3) Kualitas Pendidikan: Perbandingan nilai akademis dan non-akademis (seperti kegiatan ekstrakurikuler) sebelum dan sesudah implementasi zonasi.
- 4) Kepuasan Orang Tua dan Siswa: Tingkat kepuasan orang tua dan siswa terhadap sekolah yang dipilih melalui sistem zonasi.

## 2. Pemenuhan Hak Pendidikan

Pemenuhan hak pendidikan diartikan sebagai terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Sebagai berikut:

- 1) Aksesibilitas: Tingkat keterjangkauan sekolah oleh semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung.
- 2) Kualitas Pengajaran: Ketersediaan dan kualitas guru serta fasilitas pendidikan di berbagai zona.
- 3) Penerimaan yang Adil: Tingkat kesetaraan dalam proses penerimaan siswa, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi atau geografis.
- 4) Outcome Pendidikan: Hasil belajar yang setara di antara berbagai kelompok siswa.

## 3. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel yang menjadi penentu dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

Variabel Independen : Implementasi sistem zonasi.

Variabel Dependen: Pemenuhan hak pendidikan.

Lalu terdapat Sub-variabel dan tolak ukur dalam pengukuran:

1. Akses ke Sekolah
2. Pengukuran:
  - Rasio pendaftar terhadap kapasitas sekolah di tiap zona.
  - Persentase siswa yang diterima di sekolah dalam zona mereka.
3. Distribusi Siswa:
  - Pengukuran:
    - Analisis demografis siswa yang diterima (misalnya, berdasarkan status sosial-ekonomi, latar belakang etnis).
    - Persebaran siswa di sekolah favorit vs. Non-favorit.
4. Kualitas Pendidikan:
  - Pengukuran:
    - Perbandingan nilai ujian nasional sebelum dan sesudah implementasi zonasi.
    - Ketersediaan fasilitas pendidikan (laboratorium, perpustakaan, dll.) di berbagai sekolah.
    - Rasio siswa terhadap guru di tiap zona.
5. Kepuasan Siswa:
  - Pengukuran:
    - Survei kepuasan siswa terhadap proses penerimaan dan kualitas pendidikan yang diterima.
6. Aksesibilitas:

- Pengukuran:
  - Jarak rata-rata yang ditempuh siswa untuk mencapai sekolah.
  - Biaya transportasi dan waktu yang diperlukan.

#### 7. Kualitas Pengajaran:

- Pengukuran:
  - Kualifikasi dan pengalaman guru di berbagai sekolah.
  - Tingkat partisipasi guru dalam pelatihan profesional.

#### 8. Penerimaan yang Adil:

- Pengukuran:
  - Jumlah keluhan atau kasus manipulasi alamat.
  - Prosedur penerimaan yang transparan dan adil.

#### 9. Outcome Pendidikan

- Pengukuran:
  - Nilai akademik siswa dari berbagai latar belakang.
  - Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
  - Angka kelulusan dan penerimaan di jenjang pendidikan berikutnya.

#### **Metode Pengumpulan Data:**

##### 1. Survei dan Kuesioner:

Distribusikan kuesioner terbuka kepada siswa dan guru untuk mengukur kepuasan, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan.

## 2. Analisis Data Sekunder:

Menggunakan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan daerah, serta laporan sekolah untuk mendapatkan informasi tentang distribusi siswa, kualitas pengajaran, dan hasil pendidikan.

## 3. Wawancara Mendalam:

Lakukan wawancara dengan pejabat pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang implementasi dan dampak kebijakan zonasi.

## 4. Observasi Lapangan:

Observasi langsung di sekolah-sekolah untuk melihat fasilitas, kualitas pengajaran, dan interaksi antara siswa dan guru.

### **1.9. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian dimaknai sebagai sebuah aktivitas ilmiah yang dilakukan secara bertahap dari awal dengan proses penentuan topik, pengumpulan data serta proses analisis data, hingga nantinya akan menjawab permasalahan dan memberikan pemahaman atas topik, gejala, atau isu dari permasalahan yang diangkat. (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010)

Penelitian dilakukan dengan cermat untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data, yang nantinya akan dianalisis guna menemukan solusi sehingga masalah yang muncul dapat diatasi berdasarkan informasi yang telah terkumpul. (Bungin, 2011) menjelaskan bahwa penelitian harus menghadapi tantangan untuk mempertanyakan sains yang menjadi prioritas. Pemupukan dan perlindungannya. Dalam posisi fungsional ini, penelitian memiliki kesempatan

untuk memperbaharui pengetahuan sehingga tetap terkini, berkembang, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan sejalan dengan pandangan menurut Creswell (2008) yang dikutip dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami fenomena tertentu secara mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan partisipan, menggunakan pertanyaan yang terbuka dan luas, untuk menggali informasi mendalam yang disampaikan secara verbal. Data yang diperoleh berupa teks atau narasi, kemudian diolah melalui analisis yang bertujuan menghasilkan deskripsi atau tema utama. Selanjutnya, interpretasi dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap makna yang mendalam dari fenomena yang diteliti, disertai refleksi pribadi serta perbandingan dengan temuan penelitian lain. (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010)

Hasil dari penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk laporan yang fleksibel tanpa format yang ketat. Proses interpretasi sangat dipengaruhi oleh sudut pandang, pengetahuan, dan pengalaman peneliti, sehingga hasilnya kadang dianggap subjektif. Meski demikian, pendekatan ini tetap memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.

#### **1.9.1 Desain Penelitian**

Sehubungan dengan menjawab pertanyaan dan masalah yang muncul dan mencari solusi, mereka ingin menjawab dan membutuhkan studi yang kompleks, sehingga hasil bahan penelitian yang diperoleh nantinya dapat dipengaruhi. Dalam hal ini, metode kualitatif digunakan untuk mengkaji kebijakan sistem zonasi.



Dikutip dari buku “Metode Pendidikan Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan” Metode kualitatif melibatkan berbagai cara pengumpulan data, seperti wawancara terbuka, deskripsi hasil observasi, dan analisis dokumen atau artefak lainnya. Proses analisis dilakukan dengan menjaga keaslian teks untuk memahami makna yang terkandung. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali fenomena berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks sosial atau kelembagaan tertentu, sehingga bersifat induktif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua metode pengumpulan data utama: studi pustaka dan studi lapangan.(Rangkuti, 2019)

Studi pustaka mencakup analisis dokumen tertulis seperti laporan resmi, peraturan, atau dokumen arsip, yang dapat berasal dari sumber primer maupun sekunder. Sementara itu, pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dalam kondisi alamiah dengan melibatkan interaksi langsung di lapangan. Contohnya meliputi pengamatan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), atau keterlibatan langsung dalam proses evaluasi. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan data deskriptif, berkenaan dengan pendapat ahli yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin (2007:1), Penelitian kualitatif ini dapat diterapkan dalam mengkaji beragam aspek, seperti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dalam pandangan Bogdan dan Taylor (1992:21), penelitian kualitatif disebut sebagai cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang sedang diamati.

### **1.9.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah sekitar 1 Bulan Hingga 2 Bulan yang dimulai ketika surat perizinan penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas telah turun. Dalam hal ini lokasi penelitian berada di Pusat Kota Semarang, adapun beberapa instansi yang menjadi Lokasi Penelitian antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Cabang Dinas Pendidikan 1 Kota Semarang
3. SMA Negeri 1 Semarang
4. SMA Negeri 3 Semarang

Adanya permasalahan dan pertanyaan yang muncul dari kebijakan ini, hadir sebuah upaya untuk mengamati bagaimana Kebijakan Zonasi Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pendidikan kepada seluruh warga negara. Dalam proses analisis ini, metode penelitian kualitatif ini sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah lebih dalam mengenai Kebijakan Sistem Zonasi pada proses pemenuhan Hak Pendidikan yang di salurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Peraturan yang disebar ke setiap Daerah untuk di implementasikan.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Peserta penelitian ini melibatkan individu yang berasal dari lingkungan Pemerintahan atau Aktor Publik yang terlibat dalam proses pengembangan kebijakan zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam konteks ini, peran aktor Publik sangat penting dalam menyediakan data aktual mengenai Regulasi, Jumlah Peserta Didik, aturan yang telah dikeluarkan, serta Laporan atau keluhan yang diterima selama beberapa tahun terakhir. Sehingga subjek penelitian ini termasuk di antaranya:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Semarang
3. Kepala SMA Negeri 1 Semarang
4. Kepala SMA Negeri 3 Semarang
5. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 dan 3 Semarang
6. Peserta Didik SMA Negeri 1 dan 3 Semarang Kelas (10, 11, 12) yang mengikuti Sistem zonasi.
7. Wali Murid Peserta didik SMA Negeri 1 dan 3 Semarang yang lolos melalui jalur Zonasi.

| <b>NO</b> | <b>Narasumber</b>                                    | <b>Jumlah<br/>Narasumber</b>                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1         | Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | 1 Orang                                                           |
| 2         | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Semarang      | 1 Orang                                                           |
| 3         | SMA Negeri 1 Semarang                                | 1 Orang                                                           |
| 4         | SMA Negeri 3 Semarang                                | 1 Orang                                                           |
| 5         | Peserta Didik SMA Negeri 1 Semarang                  | Kelas 10 : 15 Siswa<br>Kelas 11 : 15 Siswa<br>Kelas 12 : 15 Siswa |
| 6         | Peserta Didik SMA Negeri 3 Semarang                  | Kelas 10 : 15 Siswa<br>Kelas 11 : 15 Siswa                        |

|  |                       |                     |
|--|-----------------------|---------------------|
|  |                       | Kelas 12 : 15 Siswa |
|  | <b>Total Informan</b> | <b>94 Orang</b>     |

Tabel 1. 1 Data dan Jumlah Narasumber

#### **1.9.4 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan objek alamiah, apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kondisinya relatif tidak berubah. Peneliti berperan menjadi instrumen dalam penelitian sehingga diperlukan teori dan wawasan terhadap topik (Sugiyono, 2015). Objek penelitian yang akan dipilih adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala SMAN 1 Semarang, Siswa Kelas (10, 11, 12) SMA Negeri 1 Semarang. Objek ini dipilih berdasarkan dengan pertimbangan:

1. Pengusul dari pembuatan peraturan provinsi tentang sistem penerimaan peserta didik baru SD, SMP, SMA, Sederajat.
2. Pengusul dari Pembuatan Peraturan Daerah tentang Sistem Penerimaan Peserta didik baru SD, SMP, SMA Negeri.
3. Pengurus atau Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Semarang.
4. Pengurus atau Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 3 Semarang.
5. Pengelola SMA Negeri 1 Semarang yang mengetahui keberlangsungan Sistem Zonasi.
6. Pemegang wewenang dari data pendaftar dan diterima peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 1 Semarang.

7. Pemegang Wewenang dari Data Pendaftar dan diterima Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMA Negeri 3 Semarang.
8. Para Pendaftar Sistem Zonasi Tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.
9. Jarak yang mampu di tempuh oleh peneliti.
10. Aktor yang Akses dan No Hp yang dapat dihubungi oleh Peneliti.

Sehingga akan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti ini, berupa analisis terkait dengan keberhasilan kebijakan sistem zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara. Dengan demikian sumber data tersebut lebih luas dan data yang diperoleh semakin memperkaya data.

#### **1.9.5 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah jenis data yang didapat langsung dari informan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data adalah segala informasi atau keterangan tentang segala hal yang terkait dengan tujuan penelitian. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang, Staff SMA Negeri 1 Semarang, serta penyebaran Kuesioner Terbuka kepada para siswa SMA Negeri 1 Semarang untuk mendapatkan data serta pandangan mengenai kebijakan sistem Zonasi. Berikut adalah rincian data primer yang telah diperoleh oleh peneliti selama penelitian sebagai:

| NO | Sumber Data                                          | Data Primer yang didapatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran Umum Regulasi PERGUB tentang PPDB Sistem Zonasi.</li> <li>2. Melihat apa saja pertimbangan yang diajukan dalam proses perumusan PERGUB tentang PPDB Sistem Zonasi.</li> <li>3. Arahan yang dilakukan DISDIKBUD Prov, kepada DISDIKBUD Kota dalam realisasi PPDB Sistem Zonasi.</li> <li>4. Sosialisasi yang pernah dilakukan kepada DISDIKBUD Kota ataupun Sekolah.</li> <li>5. Melihat persiapan yang dilakukan dalam perumusan PPDB Sistem Zonasi.</li> </ol> |
| 2  | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Semarang      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran Umum Regulasi PERWAL tentang PPDB Sistem Zonasi.</li> <li>2. Melihat apa saja pertimbangan yang diajukan dalam proses</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | <p>perumusan PERWAL tentang PPDB Sistem Zonasi.</p> <p>3. Arahan yang dilakukan DISDIKBUD Kota, kepada sekolah-sekolah dalam persiapan realisasi PPDB Sistem Zonasi.</p> <p>4. Sosialisasi yang pernah dilakukan kepada Sekolah-sekolah dan calon peserta didik baru.</p> <p>5. Melihat persiapan yang dilakukan dalam PPDB Sistem Zonasi.</p> |
| 3 | SMA Negeri 1 Semarang | <p>1. Gambaran Umum pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi.</p> <p>2. Pertimbangan yang diajukan sekolah kepada dinas, tentang permasalahan Zonasi yang terjadi di tahun sebelumnya.</p> <p>3. Melihat Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem zonasi.</p> <p>4. Mengetahui bagaimana proses pembentukan panitia PPDB sistem Zonasi.</p>     |

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           | 5. Melihat Sosialisasi yang dilakukan kepada setiap calon peserta didik tentang sistem zonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | SMA Negeri 3 Semarang                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran Umum pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi.</li> <li>2. Pertimbangan yang diajukan sekolah kepada dinas, tentang permasalahan Zonasi yang terjadi di tahun sebelumnya.</li> <li>3. Melihat Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem zonasi.</li> <li>4. Mengetahui bagaimana proses pembentukan panitia PPDB sistem Zonasi.</li> <li>5. Melihat Sosialisasi yang dilakukan kepada setiap calon peserta didik tentang sistem zonasi.</li> </ol> |
| 5 | Panitia PPDB Zonasi SMA Negeri 1 Semarang | 1. Gambaran umum tentang pembentukan Panitia Sistem Zonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi yang dilakukan untuk menjelaskan PPDB sistem zonasi kepada calon peserta didik.</li> <li>3. Melihat keluhan ataupun masalah yang disampaikan oleh pendaftar, ataupun calon peserta didik baru.</li> </ol>                                                                      |
| 6 | Panitia PPDB Zonasi SMA Negeri 3 Semarang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran umum tentang pembentukan Panitia Sistem Zonasi.</li> <li>2. Sosialisasi yang dilakukan untuk menjelaskan PPDB sistem zonasi kepada calon peserta didik.</li> <li>3. Melihat keluhan ataupun masalah yang disampaikan oleh pendaftar, ataupun calon peserta didik baru.</li> </ol> |
| 7 | Peserta Didik SMA Negeri 1 Semarang       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran umum terkait hasil dari pelaksanaan sistem zonasi.</li> <li>2. Melihat respon peserta didik yang pernah mendaftar melalui sistem Zonasi.</li> </ol>                                                                                                                               |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | 3. Mengetahui apa saja keluhan dan permasalahan yang dialami dalam proses pendaftaran hingga seleksi.                                                                                                                                                   |
| 8 | Peserta Didik SMA Negeri 3 Semarang | 1. Gambaran umum terkait hasil dari pelaksanaan sistem zonasi.<br>2. Melihat respon peserta didik yang pernah mendaftar melalui sistem Zonasi.<br>3. Mengetahui apa saja keluhan dan permasalahan yang dialami dalam proses pendaftaran hingga seleksi. |

Tabel 1. 2 Sumber Data Primer

## 2. Data Sekunder

Dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* karya I Made Laut Mertha Jaya, data sekunder dijelaskan sebagai informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, yaitu sumber yang bukan dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan penelitian mereka sendiri. Buku ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data sekunder dalam riset kuantitatif dan kualitatif untuk memperkaya analisis, menghemat waktu, dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. (Jaya, 2020)

Data sekunder dapat berupa data yang sudah dipublikasikan dalam laporan penelitian, survei, atau data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga atau badan

pemerintah. Dalam penelitian kuantitatif, data sekunder sering digunakan untuk mendukung analisis numerik atau tren, sementara dalam penelitian kualitatif, data sekunder seperti dokumen, arsip, atau laporan dapat memberikan wawasan kontekstual atau mendalam mengenai topik yang diteliti. Buku ini juga membahas bagaimana cara memvalidasi dan menilai kualitas data sekunder untuk memastikan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan. (Jaya, 2020)

Dalam penelitian mengenai kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, penggunaan data sekunder menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung analisis dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi dan dampak kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa kategori data sekunder yang relevan dalam penelitian ini:

1. Data Statistik Pendidikan: Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di berbagai jenjang (SD, SMP, SMA). Data ini akan menunjukkan sejauh mana kebijakan zonasi berperan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, serta memperlihatkan ketimpangan yang ada antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, data tentang rasio murid-guru, rasio sekolah negeri dengan swasta, serta daya tampung sekolah dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan zonasi dalam menjamin akses pendidikan yang merata.
2. Dokumen Kebijakan: Dokumen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta peraturan-peraturan terkait kebijakan PPDB berbasis zonasi sangat relevan untuk melihat dasar hukum dan aturan

yang membingkai pelaksanaan kebijakan zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur sistem PPDB berbasis zonasi di berbagai jenjang pendidikan dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi hak pendidikan secara merata, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di berbagai daerah.

3. Dokumen Media dan Berita: Artikel dari media massa seperti Kompas, Tempo, dan Detik dapat memberikan informasi kontekstual mengenai permasalahan yang muncul selama penerapan kebijakan zonasi. Berita mengenai kasus manipulasi data seperti pemindahan Kartu Keluarga atau ketimpangan akses antar kecamatan, serta perbandingan kualitas pendidikan antar wilayah yang terjadi sebagai dampak kebijakan zonasi, dapat digunakan untuk mendalami tantangan yang ada dalam implementasi kebijakan ini.
4. Kuesioner Terbuka : untuk mendapatkan pandangan dan Gambaran secara langsung dari para responden atau narasumber, yang menjelaskan bagaimana kebijakan sistem zonasi ini berlangsung dan berjalan. Selain itu untuk melihat bagaimana hasil kepuasan, tingkat pelayanan, akses, dan berbagai keunggulan serta kelemahan yang ada dalam kebijakan sistem zonasi.
5. Wawancara Terhadap Staff instansi : Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan baru terkait dengan bagaimana proses penyelesaian, perumusan, hingga melihat serta mengetahui berbagai kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi.

Dengan menggabungkan data sekunder dari sumber-sumber di atas, penelitian mengenai kebijakan zonasi dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara. Selain itu, data sekunder ini dapat memberikan bukti yang kuat untuk mengevaluasi apakah kebijakan zonasi benar-benar efektif dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, atau justru menciptakan ketimpangan yang lebih besar.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data sebagai cara untuk memperoleh informasi secara sistematis dalam proses penelitian. Biasanya, teknik pengumpulan data terdiri dari empat bentuk yang berbeda, yakni wawancara, observasi, serta survei terbuka yang disebarakan melalui platform online. Berdasarkan pandangan Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif bersifat fleksibel sebagai seorang bricoleur yang dapat memilih menggunakan alat perdagangan historis atau metodologis, serta mengadopsi berbagai strategi, metode, atau bahan empiris yang tersedia. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, serta hasil yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan cara diantaranya:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti atau pewawancara dengan narasumber, dengan tujuan berbagi ide dan informasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai topik yang diharapkan

memberikan jawaban yang relevan dalam penelitian ini, dengan berbicara langsung kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang yang bertanggung jawab atas Kebijakan Sistem Zonasi. Melakukan wawancara dengan staff SMA Negeri 1 Semarang yang berperan sebagai panitia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Adapun Beberapa Pertanyaan yang akan menjadi bahan data yang akan dijadikan pertanyaan wawancara sebagai berikut:

| No | Jabatan/Peran Informan                                                                                                                                                 | Daftar Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Staff Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah<br><br>Staff Operational Sistem Zonasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Semarang | 1. Apa peran bapak dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi?<br><br>2. Apakah selama proses pendaftaran pelaksanaan seleksi sistem zonasi, terdapat keluhan maupun permasalahan baik dari siswa maupun guru? Terkait siswa, guru dan lain-lain, ada beberapa permasalahan? Kalau boleh tahu permasalahannya itu baik internal atau eksternal ? |

|   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                         | <p>3. Apakah bapak pernah mendengar kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi?</p> <p>4. Bagaimana Harapan untuk Sistem Zonasi kedepannya? Terkait dengan akses, pelayanan, kekurangan, dan kelebihan dari sistem zonasi yang sudah berjalan sejak 2017.</p>                                                      |
| 2 | <p>Kepala SMA Negeri 1 Semarang</p> <p>Kepala SMA Negeri 3 Semarang</p> | <p>1. Apa peran bapak dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi?</p> <p>2. Apakah selama proses pendaftaran pelaksanaan seleksi sistem zonasi, terdapat keluhan maupun permasalahan baik dari siswa maupun guru? Terkait siswa, guru dan lain-lain, ada beberapa permasalahan? Kalau boleh</p> |

|   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                   | <p>tahu permasalahannya itu baik internal atau eksternal ?</p> <p>3. Apakah bapak pernah mendengar kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi?</p> <p>4. Bagaimana Harapan untuk Sistem Zonasi kedepannya? Terkait dengan akses, pelayanan, kekurangan, dan kelebihan dari sistem zonasi yang sudah berjalan sejak 2017.</p> |
| 3 | <p>Staff/Panitia Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) Sistem Zonasi</p> <p>SMA Negeri 1 Semarang</p> <p>SMA Negeri 3 Semarang</p> | <p>1. Apa peran bapak dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi?</p> <p>2. Apakah selama proses pendaftaran pelaksanaan seleksi sistem zonasi, terdapat keluhan maupun permasalahan baik dari siswa maupun guru? Terkait siswa, guru dan lain-lain, ada beberapa</p>                                     |



|   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                       | <p>permasalahan? Kalau boleh tahu permasalahannya itu baik internal atau eksternal ?</p> <p>3. Apakah bapak pernah mendengar kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi?</p> <p>4. Bagaimana Harapan untuk Sistem Zonasi kedepannya? Terkait dengan akses, pelayanan, kekurangan, dan kelebihan dari sistem zonasi yang sudah berjalan sejak 2017.</p> |
| 4 | <p>Peserta Didik SMA Negeri 1 Semarang Kelas X</p> <p>Peserta Didik SMA Negeri 3 Semarang Kelas X</p> | <p>1. Alamat tempat tinggal (Desa/Daerah)</p> <p>2. No. Hp</p> <p>3. Jenis Kelamin</p> <p>4. Usia</p> <p>5. Seberapa dekat Jarak rumah anda dengan sekolahh</p> <p>6. Transportasi</p> <p>7. Waktu perjalanan?</p>                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>8. Bagaimana Penilaian Anda terkait dengan akses dan penilaian Sistem zonasi untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 Semarang? Jelaskan Mengapa mudah ataupun sulitnya.</p> <p>9. Bagaimana pelayanan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Semarang?</p> <p>10. Apakah SMA Negeri 1 Semarang pilihan pertama anda? ataukah anda pernah cabut berkas dari pilihan sebelumnya? jika pernah cabut berkas, mohon berikan alasannya!</p> <p>11. Apakah anda pernah mendengar atau melihat tindak kecurangan pada sistem zonasi pada PPDB? jika pernah bisa disebutkan seperti apa, tanpa menyebut nama dan kelas.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                         | <p>12. Apakah anda setuju dengan kebijakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru kedepannya? Mohon jelaskan alasan anda!</p> <p>13. Apakah menurut anda sistem zonasi sudah mampu memenuhi hak pendidikan anda maupun lingkungan anda? Berikan alasan serta berikan contoh jika anda ataupun lingkungan sekitar anda pernah mengalami permasalahan pada sistem zonasi.</p> |
| 5 | <p>Peserta Didik SMA Negeri 1 Semarang Kelas XI</p> <p>Peserta Didik SMA Negeri 3 Semarang Kelas XI</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asal Daerah</li> <li>2. No. HP</li> <li>3. Jenis Kelamin</li> <li>4. Usia</li> <li>5. Sebarapa dekat jarak rumah anda dengan sekolah?</li> </ol>                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>6. Apakah Anda Menggunakan Transportasi Pribadi Ke sekolah? Jika tidak, bisa disebutkan menggunakan transportasi apa yang digunakan untuk berangkat dan pulang sekolah.</p> <p>7. Apakah anda merasa perjalanan berangkat maupun pulang dari sekolah ke rumah terasa dekat? Berapa lama perjalanan yang dibutuhkan</p> <p>8. Bagaimana Penilaian Anda terkait dengan akses dan pelayanan Pendaftaran Sistem zonasi di SMA Negeri 3 Semarang? Jelaskan Mengapa mudah ataupun sulitnya.</p> <p>9. Apakah anda mengalami peningkatan prestasi baik akademik maupun non-</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>akademik selama bersekolah di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>10. Apakah anda puas dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru? Jelaskan alasan memilih pilihan tersebut!</p> <p>11. Apakah anda setuju dengan kebijakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru untuk seterusnya? Mohon jelaskan alasan anda!</p> <p>12. Apakah anda pernah mendengar atau melihat kecurangan dari sistem zonasi? Jika ada mohon dijelaskan, tanpa menyebutkan nama</p> <p>13. Apakah menurut anda seluruh Guru di SMA Negeri 3 Semarang sudah memenuhi standar dan mampu</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                           | <p>memberikan pendidikan sesuai harapan anda?</p> <p>14. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi fasilitas fisik (kelas, loker, alat olahraga, kantin, dll) di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>15. Apakah anda memiliki kritik atau saran terkait dengan sistem zonasi untuk Pendidikan di Indonesia?</p> <p>16. Apakah anda melihat perbedaan antara siswa-siswi zonasi dan non-zonasi di lingkungan sekolah?</p> |
| 6 | <p>Peserta Didik SMA Negeri 1 Semarang Kelas XII</p> <p>Peserta Didik SMA Negeri 3 Semarang Kelas XII</p> | <p>1. Asal Daerah</p> <p>2. No. HP</p> <p>3. Jenis Kelamin</p> <p>4. Usia</p> <p>5. Sebarapa dekat jarak rumah anda dengan sekolah?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>6. Apakah Anda Menggunakan Transportasi Pribadi Ke sekolah? Jika tidak, bisa disebutkan menggunakan transportasi apa yang digunakan untuk berangkat dan pulang sekolah.</p> <p>7. Apakah anda merasa perjalanan berangkat maupun pulang dari sekolah ke rumah terasa dekat? Berapa lama perjalanan yang dibutuhkan</p> <p>8. Bagaimana Penilaian Anda terkait dengan akses dan pelayanan Pendaftaran Sistem zonasi di SMA Negeri 3 Semarang? Jelaskan Mengapa mudah ataupun sulitnya.</p> <p>9. Apakah anda mengalami peningkatan prestasi baik akademik maupun non-</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>akademik selama bersekolah di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>10. Apakah anda puas dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru? Jelaskan alasan memilih pilihan tersebut!</p> <p>11. Apakah anda setuju dengan kebijakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru untuk seterusnya? Mohon jelaskan alasan anda!</p> <p>12. Apakah anda pernah mendengar atau melihat kecurangan dari sistem zonasi? Jika ada mohon dijelaskan, tanpa menyebutkan nama</p> <p>13. Apakah menurut anda seluruh Guru di SMA Negeri 3 Semarang sudah memenuhi standar dan mampu</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>memberikan pendidikan sesuai harapan anda?</p> <p>14. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi fasilitas fisik (kelas, loker, alat olahraga, kantin, dll) di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>15. Apakah anda memiliki kritik atau saran terkait dengan sistem zonasi untuk Pendidikan di Indonesia?</p> <p>16. Apakah anda melihat perbedaan antara siswa-siswi zonasi dan non-zonasi di lingkungan sekolah?</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1. 3 Daftar Pertanyaan Wawancara

## 2. Observasi

Mendapatkan data observasi dilakukan dengan cara mengamati serta melihat objek penelitian. Tujuan Penelitian adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Semarang, staf SMA Negeri 1 Semarang, serta staf SMA Negeri 3 Semarang, baik dalam hal Data Arsip maupun

data rekam dari pendaftaran yang telah dilakukan. Sesuai dengan yang tertera di tabel Data Sekunder.

### 3. Kuesioner

Pada penelitian ini teknik pengambilan data lainnya adalah, kuesioner dengan menitik beratkan pada sudut pandang, dan melihat perbandingan data dari setiap angkatan yang diteliti agar melihat tingkat kesejahteraan sesuai dengan PERMENDIKBUD yang diubah oleh kemendikbud. Dengan membuat Kuesioner terbuka, untuk melihat tanggapan dari Peserta didik yang diterima selain dari jalur Sistem Zonasi yang ada di SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 3 Semarang adapun kriteria Narasumber yang mengisi kuesioner sebagai berikut:

1. Peserta didik kelas 10,11,12 SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 3 Semarang.
2. Lolos Seleksi Selain dari Jalur Sistem Zonasi.
3. Mengetahui apa itu Sistem Zonasi.
4. Terdapat 90 Responden.

Adapun Isi kuesioner yang akan diberikan sebagai berikut:

| No | Tujuan Kuesioner                                                                                      | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Peserta Didik SMA Negeri 1 Semarang Kelas X</p> <p>Peserta Didik SMA Negeri 3 Semarang Kelas X</p> | <p>1. Alamat tempat tinggal (Desa/Daerah)</p> <p>2. No. Hp</p> <p>3. Jenis Kelamin</p> <p>4. Usia</p> <p>5. Seberapa dekat Jarak rumah anda dengan sekolahh</p> <p>6. Transportasi</p> <p>7. Waktu perjalanan?</p> <p>8. Bagaimana Penilaian Anda terkait dengan akses dan penilaian Sistem zonasi untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 Semarang? Jelaskan Mengapa mudah ataupun sulitnya.</p> <p>9. Bagaimana pelayanan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Semarang?</p> <p>10. Apakah SMA Negeri 1 Semarang pilihan pertama anda?</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ataukah anda pernah cabut berkas dari pilihan sebelumnya? jika pernah cabut berkas, mohon berikan alasannya!</p> <p>11. Apakah anda pernah mendengar atau melihat tindak kecurangan pada sistem zonasi pada PPDB? jika pernah bisa disebutkan seperti apa, tanpa menyebut nama dan kelas.</p> <p>12. Apakah anda setuju dengan kebijakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru kedepannya? Mohon jelaskan alasan anda!</p> <p>13. Apakah menurut anda sistem zonasi sudah mampu memenuhi hak pendidikan anda maupun lingkungan anda? Berikan alasan serta berikan contoh jika anda ataupun lingkungan sekitar anda</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                 | <p>pernah mengalami permasalahan pada sistem zonasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | <p>Peserta Didik SMA Negeri<br/>1 Semarang Kelas XI</p> <p>Peserta Didik SMA Negeri<br/>3 Semarang Kelas XI</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asal Daerah</li> <li>2. No. HP</li> <li>3. Jenis Kelamin</li> <li>4. Usia</li> <li>5. Sebarapa dekat jarak rumah anda dengan sekolah?</li> <li>6. Apakah Anda Menggunakan Transportasi Pribadi Ke sekolah?<br/>Jika tidak, bisa disebutkan menggunakan transportasi apa yang digunakan untuk berangkat dan pulang sekolah.</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>7. Apakah anda merasa perjalanan berangkat maupun pulang dari sekolah ke rumah terasa dekat? Berapa lama perjalanan yang dibutuhkan</p> <p>8. Bagaimana Penilaian Anda terkait dengan akses dan pelayanan Pendaftaran Sistem zonasi di SMA Negeri 3 Semarang? Jelaskan Mengapa mudah ataupun sulitnya.</p> <p>9. Apakah anda mengalami peningkatan prestasi baik akademik maupun non-akademik selama bersekolah di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>10. Apakah anda puas dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru? Jelaskan alasan memilih pilihan tersebut!</p> <p>11. Apakah anda setuju dengan kebijakan sistem zonasi untuk</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>penerimaan peserta didik baru untuk seterusnya? Mohon jelaskan alasan anda!</p> <p>12. Apakah anda pernah mendengar atau melihat kecurangan dari sistem zonasi? Jika ada mohon dijelaskan, tanpa menyebutkan nama</p> <p>13. Apakah menurut anda seluruh Guru di SMA Negeri 3 Semarang sudah memenuhi standar dan mampu memberikan pendidikan sesuai harapan anda?</p> <p>14. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi fasilitas fisik (kelas, loker, alat olahraga, kantin, dll) di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>15. Apakah anda memiliki kritik atau saran terkait dengan sistem zonasi untuk Pendidikan di Indonesia?</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                         | <p>16. Apakah anda melihat perbedaan antara siswa-siswi zonasi dan non-zonasi di lingkungan sekolah?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | <p>Peserta Didik SMA Negeri</p> <p>1 Semarang Kelas XII</p> <p>Peserta Didik SMA Negeri</p> <p>3 Semarang Kelas XII</p> | <p>1. Asal Daerah</p> <p>2. No. HP</p> <p>3. Jenis Kelamin</p> <p>4. Usia</p> <p>5. Sebarapa dekat jarak rumah anda dengan sekolah?</p> <p>6. Apakah Anda Menggunakan Transportasi Pribadi Ke sekolah? Jika tidak, bisa disebutkan menggunakan transportasi apa yang digunakan untuk berangkat dan pulang sekolah.</p> <p>7. Apakah anda merasa perjalanan berangkat maupun pulang dari sekolah ke rumah terasa dekat? Berapa lama perjalanan yang dibutuhkan</p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>8. Bagaimana Penilaian Anda terkait dengan akses dan pelayanan Pendaftaran Sistem zonasi di SMA Negeri 3 Semarang? Jelaskan Mengapa mudah ataupun sulitnya.</p> <p>9. Apakah anda mengalami peningkatan prestasi baik akademik maupun non-akademik selama bersekolah di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>10. Apakah anda puas dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru? Jelaskan alasan memilih pilihan tersebut!</p> <p>11. Apakah anda setuju dengan kebijakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru untuk seterusnya? Mohon jelaskan alasan anda!</p> <p>12. Apakah anda pernah mendengar atau melihat kecurangan dari</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>sistem zonasi? Jika ada mohon dijelaskan, tanpa menyebutkan nama</p> <p>13. Apakah menurut anda seluruh Guru di SMA Negeri 3 Semarang sudah memenuhi standar dan mampu memberikan pendidikan sesuai harapan anda?</p> <p>14. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi fasilitas fisik (kelas, loker, alat olahraga, kantin, dll) di SMA Negeri 3 Semarang?</p> <p>15. Apakah anda memiliki kritik atau saran terkait dengan sistem zonasi untuk Pendidikan di Indonesia?</p> <p>16. Apakah anda melihat perbedaan antara siswa-siswi zonasi dan non-zonasi di lingkungan sekolah?</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1. 4 Daftar Isi Kuesioner Pertanyaan

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada metode analisis data kualitatif. Berdasarkan pandangan dari Lexy J. Menurut Moleong (1989), metode analisis kualitatif menggambarkan bahwa analisis data merupakan proses analisis yang dilakukan dalam penelitian dengan memeriksa semua informasi yang diperoleh melalui penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil pengujian, rekaman, dan sebagainya (Adriani, 2003). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif dikerjakan dengan menggunakan perangkat penelitian guna meraih temuan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan untuk merumuskan masalah yang disadari sebelum, selama, dan setelah dilakukan penelitian.

Sugiyono (2015:83) menyatakan bahwa triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018:120-121), Triangulasi data merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi data dari berbagai sumber dengan pendekatan dan waktu yang berbeda. Selanjutnya, terdapat metode triangulasi sumber, triangulasi alat pengumpulan data, serta triangulasi waktu.

Analisis merupakan proses studi yang mendalam dan hati-hati. Dengan singkatnya, analisis dapat dijelaskan sebagai tindakan menganalisis atau meneliti sesuatu dengan teliti. Dalam aspek penelitian, analisis data memiliki fungsi untuk mengolah serta memahami data guna mengungkapkan makna, tafsiran, dan perspektif tertentu dari seluruh materi penelitian.

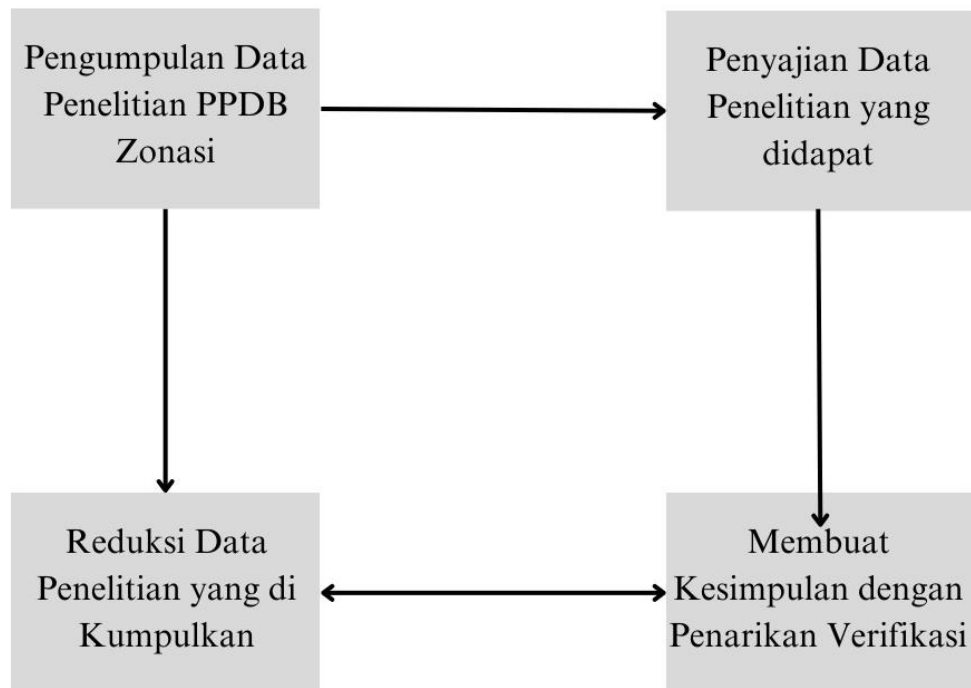
Pengolahan data dapat dipahami sebagai langkah untuk merespon data dengan cermat, menyaring, dan mengolahnya secara teratur serta berarti (Sirajuddin

Saleh, 2017:74). Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut dalam analisis data:

1. Pencarian data merupakan proses lapangan dengan persiapan pralapangan.
2. Setelah mendapatkan hasil penemuan dilapangan, data tersebut ditata secara sistematis.
3. Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan.
4. Melakukan pencarian makna secara berulang sampai tidak ada lagi keraguan. Disini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi dilapangan.

#### 1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif membutuhkan proses konseptual, yaitu tahapan menyusun konsep sebelum memulai penelitian lapangan. Selanjutnya, proses kategorisasi dan deskripsi dilakukan langsung di lapangan. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menerapkan metode model Miles dan Huberman. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1994 yang dikutip oleh Rodsyada pada tahun 2020 halaman 213-217, disebutkan bahwa terdapat tiga kegiatan penting dalam proses pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikut adalah gambar yang menunjukkan proses tersebut:



Gambar 1. 5 Proses Analisis Data

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan dan saling terhubung, mulai dari tahap 28 sebelumnya, selama di lapangan, hingga penelitian selesai. Penjelasan mengenai komponen alur disusun berdasarkan serangkaian tahapan berikut:

## 2. Reduksi Data

Pengurangan data adalah proses penyusunan ringkasan atau pemilihan informasi yang penting. Karena jumlah data yang terkumpul dari lapangan mencapai tingkat yang signifikan, maka disarankan untuk mencatat informasi tersebut dengan teliti dan terperinci. Data dikurangi sepanjang pengambilan data dilakukan, selama proses ini juga dilakukan pengkodean, penyusunan ringkasan, dan pembagian data ke dalam bagian-bagian. Proses transformasi berlangsung tanpa henti hingga tersusunnya laporan akhir penelitian secara menyeluruh.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, peneliti melanjutkan dengan menyajikan data. Pemaparan data adalah kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan dilakukannya analisis dan implementasi keputusan. Penyajian bisa berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Namun, dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data dimaksudkan untuk memperjelas situasi kepada peneliti guna mendukung perencanaan langkah-langkah berikutnya dengan lebih baik.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses pengumpulan data adalah saat menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Proses dimulai dengan pendataan secara cermat, diikuti dengan peneliti merangkum permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian mencatat informasi yang relevan sebelum akhirnya membuat kesimpulan yang mengarahkan. Pada umumnya, simpulan awal cenderung sementara dan dapat mengalami revisi seiring berjalannya proses pengumpulan data. Namun demikian, kesimpulan tadi bisa dianggap kredibel bila diperkuat dengan data yang sah dan konsisten (Rijali, 2018).